

**PENERAPAN SAK ETAP PADA LAPORAN KEUANGAN KELOMPOK
PEMUDA TANI (KPT) TUNAS MAKMUR DESA KLAMPOK
KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES**



Oleh :

APTA WIDODO HARTAMA

200912014

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

INDONESIA BANKING SCHOOL

JAKARTA

2013

Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing

**PENERAPAN SAK ETAP PADA LAPORAN KEUANGAN KELOMPOK
PEMUDA TANI (KPT) TUNAS MAKMUR DESA KLAMPOK
KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES**



Oleh :

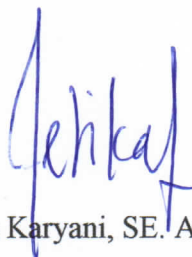
APTA WIDODO HARTAMA

200912014

Diterima dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Sidang Komprehensif

Jakarta, 12 Juli 2013

Dosen Pembimbing Skripsi



(Etika Karyani, SE. Ak., MSM)

PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF

Nama Mahasiswa : Apta Widodo Hartama
NIM : 200912014
Judul Skripsi : Penerapan SAK ETAP Pada Laporan Keuangan Kelompok Pemuda Tani (KPT) Tunas Makmur Desa Klampok Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
Penguji :
Ketua : Ira Geraldina, SE,Ak., MS.Ak.
Anggota : 1. Etika Karyani, SE.Ak., MSM.
2. Novy Silvia Dewi, SE., MM.

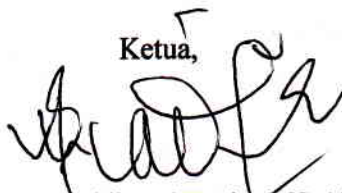
Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di atas telah mengikuti ujian komprehensif :

pada tanggal : 30 Agustus 2013

dengan hasil : B

Tim Penguji,

Ketua,



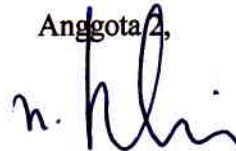
(Ira Geraldina, SE,Ak., MS.Ak.)

Anggota 1,



(Etika Karyani, SE.Ak., MSM.)

Anggota 2,



(Novy Silvia Dewi, SE., MM.)

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Apta Widodo Hartama

NIM : 200912014

Judul Skripsi : Penerapan SAK ETAP Pada Laporan Keuangan Kelompok Pemuda Tani (KPT) Tunas Makmur Desa Klampok Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

Pembimbing Skripsi

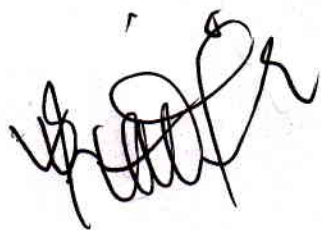


(Etika Karyani, SE.Ak., MSM.)

Tanggal Lulus : 30 Agustus 2013

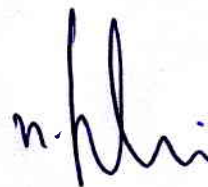
Mengetahui,

Ketua Panitia Ujian,



(Ira Geraldina, SE,Ak., MS.Ak.)

Ketua Jurusan Akuntansi,



(Novy Silvia Dewi, SE., MM.)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puja dan puji syukur dipanjatkan hanya kepada Allah SWT, sang pencipta dan penguasa alam semesta serta semua isinya atas semua berkah, rahmat dan karunianya yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis, sholawat dan salam Rasulullah Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu persyaratan wajib untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi. Adapun penulisan skripsi ini berjudul **“Penerapan SAK ETAP Pada Laporan Keuangan Kelompok Pemuda Tani (KPT) Tunas Makmur Desa Klampok Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes”**.

Skripsi ini penulis dedikasikan untuk kedua orangtua penulis, dan penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapa dan Mama tercinta, adikku Widya dan Riza serta Keluarga Besar penulis yang menjadi bagian terpenting bagi penulis yang selalu memberikan dukungan moril, materil, doa, nasihat serta kasih sayang yang sangat luar biasa dan tak ternilai selama ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan perhatian baik dalam proses penulisan skripsi maupun dalam kegiatan perkuliahan selama ini. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah :

1. Ibu Etika Karyani, SE., Ak., MSM selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan saran, pemikiran, kritikan, dukungan dan motivasi selama proses penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu.

2. Bapak Dr. Subarjo Joyosumarto selaku Ketua STIE Indonesia Banking School, Dr. Joni P. Soebandono dan seluruh jajaran Pimpinan STIE Indonesia Banking School yang telah memberikan kesempatan untuk ikut belajar, menggali ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga kepada penulis.
3. Ibu Novy Silvia Dewi SE.,MM, selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Ibu Nova Novita SE,MS.Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Indonesia Banking School.
4. Bapak Gunawan, SE., MM selaku dosen pembimbing akademik, Bapak/Ibu staff pengajar, akademik, administrasi dan karyawan STIE Indonesia Banking School yang telah membantu selama kegiatan perkuliahan dan proses penulisan skripsi.
5. Pengurus Kelompok Pemuda Tani (KPT) Tunas Makmur di Desa Klampok Kabupaten Brebes yang memberikan izin untuk penulis melakukan penelitian.
6. Siti Firsari Meirizka dan Sahabat terbaik penulis yang *limited edition* : Gondes Waskitho Adhikumoro, Aziz Arka Tomas Pradipta, Yudha Rizqola Wardhana, Isma Arief Darmawan, dan M. Hazriyansyah Akbar yang selalu memberikan semangat hiburan, canda tawa, saran, pencerahan, dukungan dan tempat bertukar pikiran.
7. Teman-teman 1f IBS 2009 : Mayang, Febri, Febi, Raii, Dyo, Tika, Sintya, Kanti, Putri, Icha, Indri, Safira, Dewa dan Tebo.
8. Pihak-pihak yang membantu penulisan skripsi dan ujian komprehensif : Dita, Esa, Riri, Fallah, Elfa, Adit, Alvin, Mufqi, Ilham, Yunica, Aican, Tito, Lutfi, Dika, Rahmi, Fifi, Adieb, Opah, Topan, Tufel, Raymond, Yoga,
9. Staff pengajar di Smart and Fun After School Terogong, Jakarta serta murid-murid yang sangat menggemaskan dan bandel : Jason, Ben, Hubert, David, Matthew, Oliver dan Chloe

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas penulisan skripsi yang masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan kualitas penulisan di masa yang akan datang

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jakarta, Juli 2013

Penulis



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	x
Lembar Pernyataan Karya Sendiri	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	7
1.7 Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	
2.1 Kajian Teori	9
2.2 Tinjauan Pustaka	13
2.2.1 Standar Akuntansi di Indonesia	13
2.2.2 SAK ETAP	15
2.2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	25
2.2.4 Koperasi	27
2.2.5 Laporan Keuangan	30
2.3 Penelitian Terdahulu	47
2.4 Rerangka Pemikiran Penelitian	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Gambaran Objek Penelitian	52
3.2 Metode Pengumpulan Data	53

3.2.1 Jenis Data dan Sumber Data	53
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	54
3.3 Metode Analisis Data	57
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	59
4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian.....	64
4.2.1 Pembahasan Perumusan Masalah	64
4.2.2 Argumentasi Penelitian Berdasarkan Permasalahan	86
4.2.3 Perbedaan dengan Hasil Penelitian Sebelumnya	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran	92
5.2.1 Bagi KPT Tunas Makmur.....	92
5.2.2 Bagi Pemerintah Daerah.....	93
5.2.3 Bagi Penelitian Selanjutnya.....	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS SKRIPSI	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran Penelitian.....	51
Gambar 4.1 Klasifikasi Organisasi Pertanian.....	59
Gambar 4.2 Bagan Struktur Pengurus KPT Tunas Makmur	61



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Neraca sesuai SAK ETAP	31
Tabel 2.2	Analisis Sifat Beban	32
Tabel 2.3	Analisis Fungsi Beban.....	33
Tabel 2.4	Laporan Perubahan Ekuitas menurut SAK ETAP.....	34
Tabel 2.5	Laporan Arus Kas menurut SAK ETAP.....	35
Tabel 2.6	Perbedaan SAK ETAP dengan SAK Umum	39
Tabel 2.7	Kas Sesuai SAK ETAP.....	41
Tabel 2.8	Persediaan Sesuai SAK ETAP.....	41
Tabel 2.9	Aset Tetap Sesuai SAK ETAP	42
Tabel 2.10	Kewajiban Sesuai SAK ETAP	43
Tabel 2.11	Modal sesuai SAK ETAP	43
Tabel 2.12	Saldo Laba sesuai SAK ETAP	44
Tabel 2.13	Pendapatan Operasional sesuai SAK ETAP.....	45
Tabel 2.14	Beban Operasional sesuai SAK ETAP	45
Tabel 2.15	Beban Pajak sesuai SAK ETAP	46
Tabel 2.16	Penelitian Terdahulu.....	47
Tabel 4.5	Neraca Tahun 2012.....	68
Tabel 4.6	Neraca 31 Mei 2013	68
Tabel 4.3	Laporan Laba Rugi Tahun 2012.....	69
Tabel 4.4	Laporan Laba Rugi 31 Mei 2013.....	70
Tabel 4.7	Laporan Arus Kas Tahun 2012.....	71
Tabel 4.8	Laporan Arus Kas 31 Mei 2013	71

Tabel 4.7 Kas SAK ETAP dan KPT.....	72
Tabel 4.8 Persediaan SAK ETAP dan KPT.....	74
Tabel 4.9 Aset Tetap SAK ETAP dan KPT	76
Tabel 4.10 Kewajiban SAK ETAP dan KPT.....	77
Tabel 4.11 Modal SAK ETAP dan KPT	79
Tabel 4.12 Saldo Laba SAK ETAP dan KPT.....	81
Tabel 4.13 Pendapatan SAK ETAP dan KPT	82
Tabel 4.14 Beban Operasional SAK ETAP dan KPT	83
Tabel 4.15 Beban Pajak SAK ETAP dan KPT.....	85
Tabel 4.16 Ringkasan Kesesuaian pos-pos Laporan Keuangan KPT dengan SAK ETAP.....	88



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 Daftar nama pengurus dan anggota KPT Tunas Makmur
- Lampiran 3 Laporan Keuangan KPT Tunas Makmur Desember 2012
- Lampiran 4 Laporan Keuangan KPT Tunas Makmur Mei 2013



LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Apta Widodo Hartama

NIM : 200912014

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila kemudian hari ternyata skripsi ini merupakan hasil plagiat atau menjiplak karya orang lain, saya bersedia mempertanggungjawabkannya dan sekaligus bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan STIE IBS.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar.

Penulis,

Apta Widodo Hartama

ABSTRACT

According to the statements from IAI, the agricultural sector of Small and Medium Enterprises (SMEs) is the most appropriate for the alleviation of poverty and developed immunity to the nation and the global financial crisis to reduce urbanization. There are many organizations and groups union farmers both active and inactive in district of Brebes, there are 54 agricultural cooperatives are not active on the total of 58 cooperatives. The purpose of this research is to determine the understanding union farmers in the district of Brebes on the recognition, measurement, presentation and disclosure in the financial statements and to determine the suitability of accounting standards on the financial statements of union farmers by SAK ETAP.

Law No.17 of 2012 regarding cooperatives explained that cooperatives should be able to explain the use of funds derived from capital cooperative members through financial statements. This is a qualitative study. Data is collected by doing field research and library research then analysed descriptively. Analysis by conducting interviews on the board and see the entities shoots prosperous financial statements dis ach account created to comply with the provisions SAK ETAP.

Based on the analysis and discussion of the proposed formulation of the problem is that the results obtained two prosperous shoots the entities is not understand about aspects of recognition, measurement, presentation and disclosure due to lack of human resources who know the knowledge of accounting. Level of compliance with the financial statements SAK ETAP still very low as in the recognition and measurement of fixed assets and inventory, presentation and disclosure of liabilities and expenses.

Keywords : SAK ETAP, SMEs, Financial Statements, Cooperatives

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kegiatan sehari-hari tidak akan pernah terlepas dari aktifitas ekonomi yang telah menjadi bagian dari kehidupan yang digerakkan melalui perusahaan-perusahaan dengan skala kecil sampai yang besar. Perusahaan dengan skala kecil membutuhkan modal yang relatif sedikit untuk membangun aktifitas ekonomi dan mempekerjakan orang. Menurut Widodo (2006), Biro Pusat Statistik mendefinisikan sektor informal sebagai perusahaan tidak berbadan hukum. Sektor informal ini diyakini memiliki peranan besar dalam pengembangan sumber daya manusia lokal melalui pengadaan pelatihan dan keterampilan. Saat ini sektor informal lebih dikenal dan berkembang dengan nama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM mempunyai potensi yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi serta menjadi sumber utama pendapatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kristanto, 2011). Di kota-kota kecil dan pedesaan, UMKM memegang peranan penting dalam memberdayakan penduduk lokal dengan bekerja sebagai pegawai maupun buruh. Kuliah Umum di IBS (Jum'at, 23 Desember 2011) dengan pembicara Bapak Jan Hoesada dari IAI, menjelaskan bahwa UMKM sektor pertanian merupakan sektor paling tepat untuk dikembangkan dalam pengentasan kemiskinan dan imunitas bangsa terhadap krisis moneter global serta mengurangi arus urbanisasi ke kota. Ini merupakan salah satu alasan penulis tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian di bidang pertanian.

Banyak sekali daerah-daerah yang mempunyai potensi UMKM yang besar, salah satunya Kabupaten Brebes. Bawang merah bagi Kabupaten Brebes menjadi *trademark* karena posisinya sebagai penghasil terbesar komoditi di tataran nasional serta memiliki *brand image* bagi konsumen bawang merah di Indonesia. Bawang merah Kabupaten Brebes terkenal dengan kualitas yang lebih baik dari bawang merah daerah lain di Indonesia dan luar negeri (Rosyadi, Achmad dan Triyono, 2010).

Terdapat banyak koperasi dan kelompok petani bawang merah baik yang masih aktif dan tidak aktif di Kabupaten Brebes. Terdapat 4 koperasi pertanian yang masih aktif di Kabupaten Kebumen dari total 58 koperasi dan terjadi sudah lama dikarenakan berbagai faktor seperti hilangnya hak prerogatif untuk menjual pupuk dan obat, lemahnya manajemen dan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran untuk membuat usaha bersama (suaramerdeka.com). Hal yang sama terjadi di Kabupaten Brebes, sebagian besar koperasi tani menutup usahanya.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menganggap kemajuan pertanian di Era Orde Baru lebih dikarenakan pemerintah memiliki data statistik yang kuat dan *valid* yang sangat berbeda dengan pemerintahan saat ini. Belajar bertani di Indonesia dari tahun 1974 sampai tahun 1980, Thailand, Vietnam dan Bangladesh mampu membuat pertanian di negaranya yang lebih maju dibandingkan dengan Indonesia saat ini (detikfinance). Oleh karena itu pemerintah melalui BPS menggelar program sensus pertanian 2013 untuk mendapatkan data pertanian yang kuat. BPS masih menghadapi kesulitan yang menghambat keberhasilan program ini yaitu sifat tidak terbukanya responden/petani (detikfinance). Maka dari itu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk membantu menjalankan program pemerintah.

Menurut Bank Indonesia, pihak perbankan harus berani memberikan kredit kepada petani sebagai alternatif meningkatkan produksi danantisipasi fluktuasi harga pangan (Koran Republika). Tetapi selama ini petani dan UMKM kesulitan mendapatkan akses ke perbankan untuk memperoleh kucuran dana kredit, dikarenakan sebagian besar pengajuan kredit tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan seperti kredibilitas usaha serta kondisi pelaporan keuangan. Selain itu juga karena perbankan memegang teguh prinsip kehati-hatian untuk menjaga likuiditas dan keamanan dana pihak ketiga.

Akuntansi mempunyai peran bagi UMKM karena penyediaan informasi akuntansi bagi usaha kecil diperlukan khususnya untuk akses subsidi pemerintah dan akses tambahan modal (Auliyah, 2012). Kewajiban penyelenggaraan akuntansi bagi UMKM terdapat pada UU Usaha Kecil dan Menengah No.9 Tahun 2008 dalam UU Perpajakan. Sedangkan menurut Ervillia (2009) banyak UMKM yang tidak mengetahui cara pembuatan laporan keuangan, sehingga menjadi kendala dalam pengajuan pinjaman dana. Menurut Wahdini dan Suhairi (2006) standar akuntansi yang digunakan terlalu banyak dan menyulitkan UMKM untuk menyusun laporan keuangan, sehingga memberatkan (*overload*).

Keterbatasan yang dihadapi UMKM salah satunya latar belakang pendidikan yang tidak mengenal akuntansi, oleh karena itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah mensahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan berlaku efektif per 1 januari 2011 (IAI, 2011). Sehingga pelaku usaha kecil tidak perlu membuat laporan keuangan dengan

menggunakan PSAK umum dan ada pemisahan antara pengusaha besar dan kecil dalam pembuatan laporan keuangan (Kristanto, 2011).

Menurut Martani (2011) SAK ETAP diadopsi dari IFRS *for Small Medium Enterprise*, namun ada beberapa bagian standar yang tidak diadopsi seperti instrumen keuangan, penggabungan usaha dan laporan keuangan konsolidasi. Sampai saat ini sosialisasi SAK ETAP kepada perusahaan kecil dan menengah masih kurang, sehingga sebagian perusahaan tidak memahami bahwa perusahaannya lebih tepat dan mudah menggunakan SAK ETAP.

Paragraf 1.1 (b) SAK ETAP menyebutkan entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal seperti kreditur dan serta lembaga pemeringkat kredit. Maka dari itu kelompok petani bawang merah dapat menggunakan SAK ETAP sebagai standar akuntansi mereka karena penerapannya lebih mudah dipahami dan tidak terlalu kompleks dibanding PSAK umum. Pengguna eksternal disini untuk para petani adalah pihak bank yang telah memberikan kredit penambahan modal kerja kepada mereka. Selain itu juga pemerintah daerah menjadi pihak eksternal, ketika kelompok petani dapat mengajukan program pertanian ataupun mengajukan bantuan harus menyertakan laporan keuangan.

Penelitian Edi Susanto (2011) di UMKM Kelurahan Mojosongo dan penelitian Kristanto (2011) pada UMKM pengrajin rotan di desa Trangsan Kabupaten Sukoharjo membahas tentang penerapan SAK ETAP menyebutkan bahwa UMKM belum mampu menyajikan laporan keuangan yang sesuai SAK ETAP karena

terdapat banyaknya kendala seperti kurangnya pengetahuan. Pada penelitian di BPR Dana Raya di Kota Manado oleh Kaparang (2012) tentang penerapan SAK ETAP pada praktik akuntansi perbankan juga menyebutkan ada beberapa aturan SAK ETAP tidak diterapkan pada BPR.

Penelitian Ariyani (2012) menemukan bahwa Toko Angel Store sebagai pelaku usaha kecil dan menengah belum dapat menerapkan SAK ETAP namun sudah melakukan kegiatan pencatatan dengan baik. Penelitian Anna (2011) menyebutkan UMKM yang mendapat bantuan dana dari bank saja yang membuat laporan keuangan secara lengkap.

Karena itulah penulis sangat termotivasi untuk bisa memberikan sumbangsih sebagai bakti pada negeri yang diawali dari daerah dengan melakukan penelitian **“Penerapan SAK ETAP pada Laporan Keuangan Kelompok Pemuda Tani (KPT) Tunas Makmur Desa Klampok Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Kebutuhan akan laporan keuangan yang bisa menjelaskan kondisi kelangsungan usaha petani bawang merah khususnya pihak eksternal seperti perbankan yang menyalurkan kredit serta pemerintah yang membutuhkan data keuangan sektor pertanian. Pelaku usaha kecil sulit membuat laporan keuangan karena terdapatnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang terlalu rumit dan memberatkan, selain itu kurangnya pemahaman mengenai peran dan manfaat laporan keuangan yang sesuai standar untuk UMKM.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menjadikan penelitian ini lebih tepat sasaran, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu Kelompok Tani yang melakukan kegiatan bercocok tanam bawang merah sebagai berikut :

1. Laporan keuangan Kelompok Tani periode tahun 2012 dan Semester I tahun 2013
2. Analisis laporan keuangan menggunakan aspek kuantitatif saja yaitu dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemahaman KPT Tunas Makmur tentang aspek kuantitatif laporan keuangan yaitu dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan?
2. Apakah penerapan standar akuntansi pada laporan keuangan KPT Tunas Makmur di Kabupaten Brebes sudah sesuai dengan SAK ETAP ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pemahaman KPT Tunas Makmur di Kabupaten Brebes tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan.

2. Untuk mengetahui kesesuaian standar akuntansi pada laporan keuangan KPT Tunas Makmur di Kabupaten Brebes dengan SAK ETAP.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi KPT Tunas Makmur

Petani lebih mengerti mengenai kondisi keuangan usahanya dengan membandingkan hasil analisis peneliti berdasarkan standar akuntansi yang digunakan KPT dengan SAK ETAP. KPT juga mengerti tata cara pembuatan laporan keuangan yang baik dan memenuhi standar akuntansi serta menjadi bahan pertimbangan yang baik untuk menerapkan SAK ETAP.

2. Bagi Penulis

Peneliti mendapatkan kesempatan untuk mempelajari lebih dalam tentang SAK ETAP dan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian yang juga dapat saling berbagi ilmu pengetahuan.

3. Bagi Instansi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan akuntansi. Sebagai bahan pertimbangan alternatif untuk melakukan beberapa penelitian ekonomi dan akuntansi untuk menggali lebih dalam potensi daerah.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis menjelaskan latar belakang mengapa melakukan penelitian ini, perumusan masalah serta batasan lingkungannya, tujuan penelitian yang dilakukan serta manfaat yang nantinya akan didapat dengan adanya penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Penulis mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian serta kerangka pemikiran atas penelitian yang akan dilakukan penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan objek penelitian yang akan diteliti, jenis data, teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis, serta metode digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang pembahasan dari perumusan masalah berdasarkan uji analisis serta mekanisme penelitian yang telah disusun.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pengambilan kesimpulan dari semua metode dan langkah serta pembahasan penelitian. Memberikan saran dan implikasi dari adanya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Penulis menguraikan referensi-referensi berupa buku, jurnal, maupun bahan seminar yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Kajian Teori

Standar Akuntansi

Akuntansi mempunyai kerangka teori konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan yang terdiri dari standar (teknik dan prinsip) dan praktik yang sudah diterima umum yang kemudian disebut sebagai standar akuntansi. Di Indonesia berlaku Prinsip Akuntansi Indonesia yang diganti menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia kemudian menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Sedangkan di Amerika Serikat berlaku *General Accepted Accounting Principle (GAAP)* kemudian *Accounting Principle Board Statement (APBS)* dan terakhir menjadi *FASB statement* (Harahap, 2011:153).

Standar akuntansi merupakan masalah penting dalam profesi maka dari itu penyusunan standar akuntansi hanya dilakukan oleh pihak/lembaga tertentu di masing-masing Negara. Di Indonesia yang berhak menyusun standar akuntansi adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dibawah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan. Standar akuntansi memiliki banyak manfaat terutama bagi pengguna laporan keuangan. Menurut Harahap (2011:154) menjelaskan alasan pentingnya standar akuntansi sebagai berikut:

1. Dapat menyajikan informasi tentang posisi keuangan, prestasi dan kegiatan perusahaan. Informasi disusun berdasarkan standar akuntansi

yang diharapkan mempunyai sifat jelas, konsisten, terpercaya dan dapat diperbandingkan.

2. Memberi pedoman dan peraturan bagi akuntan publik agar dapat melaksanakan tugas dengan berhati-hati, independen dan dapat mengabdikan keahlian dan kejujurannya melalui penyusunan laporan akuntan.
3. Memberikan data base kepada regulator tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak, perencanaan ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi.
4. Menarik perhatian para ahli dan praktisi di bidang teori dan standar akuntansi sehingga termotivasi untuk melakukan penelitian.

a) Perumusan Standar Akuntansi di Amerika Serikat

Menurut Schroeder (2011:99) dan Harahap (2011:168) fungsi FASB adalah untuk membentuk dan mengembangkan standar-standar akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai pedoman dan pendidikan bagi publik. Penyusunan standar akuntansi keuangan AS sangat berpegang pada kerangka teoritis konseptual yang ditetapkan FASB sebagai berikut :

1. SFAC No.1, *Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises* diterbitkan November 1978 mengenai tujuan laporan keuangan untuk perusahaan dan organisasi non profit.
2. SFAC No.2, *Qualitative Characteristics of Accounting Information* diterbitkan Mei 1980 merupakan fundamental yang mencakup cirri

kualitatif dari informasi akuntansi dan juga memberikan pedoman tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan

3. SFAC No.4, *Objectives of Financial Reporting by Nonbusiness Organizations* diterbitkan November 1980 menyajikan tujuan dan sasaran akuntansi untuk organisasi non laba
4. SFAC No.5, *Recognition and measurement in Financial Statements of Business Enterprises* diterbitkan Desember 1984 merupakan upaya FASB untuk mengikat bersama pendekatan pemeliharaan modal dan pendekatan transaksi akuntansi dengan pengukuran pendapatan
5. SFAC No.6, *Elements of Financial Statements* diterbitkan Desember 1985 mengenai asset, hutang, modal, pendapatan dan biaya yang digunakan untuk mengukur kinerja dan posisi keuangan entitas.

b) Trueblood Committee

Tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Menurut Harahap (2011: 136) *Trueblood* beranggotakan sembilan orang yang berasal dari akademisi dan praktisi ditugaskan untuk merumuskan tujuan laporan keuangan dan menentukan beberapa hal berikut:

- a. Siapa yang memerlukan laporan keuangan
- b. Informasi apa yang mereka perlukan
- c. Berapa banyak informasi yang diperlukan yang dapat disuplai oleh akuntansi

- d. Kerangka apa yang dibutuhkan untuk menyusun informasi yang diperlukan

b). Perumusan SAK ETAP di Indonesia

Standar akuntansi yang berlaku di dunia saat ini adalah *International Financial Reporting Standard (IFRS)* yang dikeluarkan oleh *International Accounting Standard Board (IASB)*. Standar tersebut telah diterapkan di hampir seluruh Negara di dunia termasuk Indonesia. Akan tetapi standar tersebut hanya dapat digunakan apabila entitas memiliki sumber daya manusia yang kompeten, memiliki kemampuan dan latar belakang pendidikan akuntansi yang baik. Permasalahan terbesar saat ini adalah bagaimana penerapan standar akuntansi pada perusahaan kecil yang transaksinya tidak terlalu banyak dan kompleks seperti perusahaan besar.

Keadaan seperti diatas langsung mendapat tanggapan dari IAI dan berawal dari diadakannya *The 86th ASEAN Federation of Accountants Councils Meeting* dan *The AFA Roundtable Discussion on SMEs* tanggal 30 Mei 2006 di Jakarta, IAI dan DSAK diwakili Jan Hoesada mengajukan makalah berjudul "*A Proposed Blue Print Toward International SMEs Accounting Standards*" yang mendapat reaksi positif dari peserta dan pimpinan acara yang hadir. Setelah dilakukan berbagai kajian dan penelitian para ahli, maka terbentuk standar akuntansi untuk usaha kecil dan menengah yaitu SAK ETAP yang diluncurkan pada bulan Juli 2009 dan berlaku efektif pada awal 2011 (IAI, 2010).

Diharapkan dengan adanya SAK ETAP mampu meningkatkan jumlah wajib pajak yang didorong pula dengan program komputerisasi Wajib Pajak UKM serta koperasi dan terbentuk visi baru IAI tentang perekonomian Indonesia berbasis UKM sebagai benteng pertahanan bangsa terhadap krisis global, meningkatkan ekonomi perkapita, kesempatan kerja dan kontribusi UKM terhadap PDB. Diharapkan pula BI dan IAI untuk membangun lembaga sertifikasi aplikasi SAK ETAP bagi pelaku usaha kecil dan menengah termasuk BPR dan koperasi.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Standar Akuntansi di Indonesia

Standar akuntansi digunakan untuk memudahkan menyusun laporan keuangan, memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Menurut Martani (2011) standar akuntansi yang saat ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan di Indonesia ada empat macam, yaitu :

1. Standar Akuntansi Keuangan (berbasis IFRS)
2. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)
3. Standar Akuntansi Keuangan Entitas (SAK ETAP)
4. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Berikut beberapa penjelasan singkat tentang ketiga standar akuntansi diatas:

a) Standar Akuntansi Keuangan (berbasis IFRS)

Diterbitkan dan disahkan oleh Dewan Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) menghasilkan PSAK. Menurut Kaparang (2012) awal tahun 2012 merupakan tahun efektif implementasi hasil konvergensi IFRS yang wajib diterapkan pada entitas dengan akuntabilitas publik signifikan. Standar akuntansi ini sejalan dengan IFRS yang lebih mengedepankan pada *professional judgment*, *fair value* dan *full disclosure*.

b) Standar Akuntansi Syariah

Merupakan pengembangan PSAK umum namun berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI (Martani, 2011). Semakin berkembangnya bisnis syariah menuntut berlakunya standar akuntansi berbasis syariah yang akhirnya membuat badan pengawas sesuai syariat islam bernama dewan syariah.

c) Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi keuangan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang menerapkan SAP berbasis akrual dan bukan berbasis kas. Penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi SAP berbasis akrual.

2.2.2 Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

(SAK ETAP)

2.2.2.1 Pengertian SAK ETAP

Terdapat pada SAK ETAP Paragraf 1.1 menjelaskan bahwa :

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan pada entitas tanpa akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah entitas yang:

- 1) tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
- 2) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purposes financial statements*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha seperti pemerintah daerah, kreditor dan lembaga pemeringkat kredit.

Menurut IAI (2011), menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum meliputi pemegang saham, kreditor, pekerja dan masyarakat luas.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan adalah :

- 1) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk penerbitan efek di pasar modal;

- 2) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi”.

a) Karakteristik SAK ETAP

Karakteristik SAK ETAP menurut IAI (2011) adalah sebagai berikut :

- 1) *Stand Alone Accounting Standard* (tidak mengacu ke SAK umum)
- 2) Mayoritas menggunakan *historical cost concept*
- 3) Hanya mengatur transaksi yang umum dilakukan usaha kecil dan menengah
- 4) Pengaturan lebih sederhana dibandingkan SAK non-ETAP yaitu alternatif yang dipilih adalah alternatif yang sederhana, penyederhanaan pengakuan dan pengukuran serta pengurangan pengungkapan.
- 5) Tidak akan berubah selama beberapa tahun

Menurut Martani (2011) SAK ETAP dipilih untuk UMKM karena PSAK-IFRS based sulit diterapkan bagi perusahaan kecil dan menengah karena penentuan *fair value* memerlukan biaya yang tidak murah yang menggunakan *principle based* sehingga membutuhkan banyak *professionnal judgment* dan IT yang kuat. Maka dari itu SAK ETAP dipilih sebagai solusi untuk UMKM.

b) Manfaat SAK ETAP

Berikut manfaat diterapkannya SAK ETAP menurut Martani (2011):

- 1) Diharapkan perusahaan kecil dan menengah mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri serta dapat diaudit dan

mendapatkan opini audit sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mencari dana pinjaman untuk pengembangan usaha

- 2) Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK-IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya
- 3) Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

2.2.2.2 Konsep dan Prinsip Pervasif

a) Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Martani (2011) disebutkan ada beberapa tujuan dan manfaat dibuatnya laporan keuangan, sebagai berikut :

- 1) Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- 2) Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) dan pertanggung jawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya
- 3) Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai
- 4) Menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non keuangan

b) Karakteristik Kualitatif Informasi Laporan Keuangan

Terdapat sepuluh (10) karakteristik laporan keuangan menurut SAK ETAP (2009), sebagai berikut :

1) Dapat Dipahami

Paragraf 2.2. Kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

2) Relevan

Paragraf 2.3. “Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu”.

3) Materialitas

Paragraf 2.4. “Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*)”.

4) Keandalan

Paragraf 2.5. Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

5) Substansi Mengungguli Bentuk

Paragraf 2.6. “Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan”.

6) Pertimbangan Sehat

Paragraf 2.7. “Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga asset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah”.

7) Kelengkapan

Paragraf 2.8. “Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi”.

8) Dapat Dibandingkan

Paragraf 2.9. “Pegguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif”.

9) Tepat Waktu

Paragraf 2.10. “Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya”.

10) Keseimbangan Antara Biaya dan Manfaat

Paragraf 2.11. “Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal”.

c). Pengakuan Laporan Keuangan

Menurut Edwin et all (2012:14) Pengakuan adalah proses pemasukan didalam suatu pos laporan keuangan yang memenuhi definisi dari asset, liabilitas, penghasilan dan beban. Dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa pengakuan adalah proses menggabungkan item yang memenuhi elemen dan unsur keuangan (Schroeder. 2011:102). Kriteria pengakuan adalah

dimungkinkan bahwa suatu manfaat ekonomis dimasa datang yang berhubungan dengan pos akan mengalir dari suatu entitas. Pos mempunyai suatu biaya (*cost*) atau nilai (*value*) yang dapat diukur dengan secara andal.

1) Pengakuan Aset

Diakui ketika manfaat ekonomis dimasa depan yang akan mengalir ke entitas dan asset tersebut mempunyai suatu biaya (*cost*) atau nilai (*value*) yang dapat diukur secara andal (Edwin et all, 2012:16).

2) Pengakuan Liabilitas

Liabilitas diakui apabila:

- a. Entitas mempunyai suatu kewajiban pada tanggal pelaporan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu.
- b. Dimungkinkan bahwa entitas harus mentransfer sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis dan dapat diukur secara andal (Edwin et all, 2012:16).

3) Pengakuan Penghasilan

Secara langsung disebabkan oleh pengakuan dan pengukuran asset dan liabilitas. Penghasilan diakui atas suatu peningkatan manfaat ekonomis dimasa depan yang ditimbulkan oleh peningkatan atas asset atau penurunan liabilitas.

4) Pengakuan Beban

Beban diakui atas penurunan manfaat ekonomis masa depan yang disebabkan oleh penurunan asset atau kenaikan liabilitas.

d). Pengukuran Laporan Keuangan

Menurut Edwin et all (2012) Pengukuran adalah proses penentuan jumlah moneter dari asset, liabilitas, penghasilan dan beban yang dinyatakan dalam laporan keuangan dengan berbasis pada biaya historis dan nilai wajar. Menurut IAI (2009) pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur asset, kewajiban, pendapatan dan beban. Pengukuran didefinisikan sebagai proses penentuan jumlah moneter dimana unsur laporan keuangan harus diakui dan dicatat (Schroeder. 2011:102).

Menurut SAK ETAP (2009) paragraf 2.31 ada dua dasar pengukuran laporan keuangan yaitu :

1) Biaya Historis

Asset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh asset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari asset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.

2) Nilai Wajar

Adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu asset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

e). Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan

Menurut IAI (2009 paragraf 3.2 - 3.16) adalah sebagai berikut :

1) Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan asset, kewajiban, pendapatan dan beban.

2) Kepatuhan Terhadap SAK ETAP

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.

3) Kelangsungan Usaha

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha.

4) Frekuensi Pelaporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali.

5) Penyajian yang Konsisten

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali jika terjadi perubahan yang signifikan atas sifat

operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi.

6) Informasi Komparatif

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan).

7) Materialitas dan Agregasi

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

8) Laporan Keuangan Lengkap

Laporan keuangan entitas meliputi :

- a. Neraca
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan :
 - i. Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
 - ii. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelas lainnya.

9) Identifikasi Laporan Keuangan

Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut.

2.2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a) Pengertian UMKM

Peraturan yang mengatur mengenai UMKM adalah Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1) Usaha Mikro

“Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro” (UU No. 20 tahun 2008).

2) Usaha Kecil

“Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil” (UU No. 20 tahun 2008).

3) Usaha Menengah

“Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang diatur” (UU No. 20 Tahun 2008).

Disebutkan dalam UU tersebut bahwa tujuan pembentukan UMKM adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

b) Kriteria UMKM

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada bab IV pasal 6 menerangkan bahwa:

1) Kriteria Usaha Mikro

- i. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- ii. Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

2) Kriteria Usaha Kecil

- i. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

- ii. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

3) Kriteria Usaha Menengah

- i. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- ii. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

2.2.4 Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (UU No.17 Tahun 2012).

Fungsi dan peran Koperasi adalah :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat ;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Keanggotaan dan perangkat koperasi menurut UU No.17 Tahun 2012 sebagai berikut :

- a) Anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.
- b) Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota
- c) Keanggotaan koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.
- d) Rapat anggota adalah perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- e) Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus.

- f) Pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- g) Setoran pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu koperasi.
- h) Modal penyertaan adalah penyetoran modal kepada koperasi berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.

Menurut UU No.17 Tahun 2012 ada tujuh (7) prinsip koperasi yaitu sebagai berikut :

- a) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- b) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
- c) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
- d) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
- e) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi
- f) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional

- g) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

2.2.5 Laporan Keuangan

2.2.5.1 Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP

a) Neraca

Paragraf 4.2 SAK ETAP (2009) Informasi yang disajikan dalam neraca minimal mencakup pos-pos sebagai berikut :

1. Kas dan setara kas
2. Piutang usaha dan piutang lainnya
3. Persediaan
4. Properti investasi
5. Aset tetap
6. Aset tidak berwujud
7. Utang usaha dan utang lainnya
8. Asset dan kewajiban pajak
9. Kewajiban diestimasi
10. ekuitas

Entitas mengklasifikasikan aset sebagai asset lancar jika :

- Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas.
- Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

- Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode.

Entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika :

- Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal entitas.
- Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan
- Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang akan disajikan.

Tabel 2.1 Neraca sesuai SAK ETAP

Nama Usaha NERACA Per 31 “Bulan” “Tahun”	
<u>ASET</u> Kas dan Setara Kas Piutang Usaha dan Piutang Lainnya Persediaan Properti Investasi Aset Tidak Berwujud Aset Tetap	<u>PASIVA</u> Kewajiban Utang Usaha dan Utang Lainnya Kewajiban Pajak <u>EKUITAS</u>

Sumber : SAK ETAP (2009)

b) Laporan Laba Rugi

Paragraf 5.5 SAK ETAP (2009) laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut :

- 1) Pendapatan
- 2) Beban keuangan
- 3) Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas
- 4) Beban pajak
- 5) Laba atau rugi neto

Menurut SAK ETAP (2009) ada dua macam analisis beban dalam suatu klasifikasi, yaitu :

a. Analisis Menggunakan Sifat Beban

Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan dalam laporan laba rugi berdasarkan sifatnya (contoh : penyusutan, pembelian bahan baku, biaya transportasi, imbalan kerja dan biaya iklan) dan tidak dialokasikan kembali antara berbagai fungsi dalam entitas

Tabel 2.2 Analisis Sifat Beban

Pendapatan		x
Pendapatan operasi lain		x
Perubahan persediaan barang jadi dan barang dalam proses	x	
Bahan baku yang digunakan	x	
Beban pegawai	x	
Beban penyusutan dan amortisasi	x	
Beban operasi lainnya	<u>x</u>	
Jumlah beban operasi		<u>(x)</u>
Laba operasi		x

Sumber : SAK ETAP 2009

b. Analisis Menggunakan Fungsi Beban

Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan sesuai fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan. Sebagai contoh adalah biaya aktivitas distribusi atau aktivitas administrasi. Sekurang-kurangnya entitas harus mengungkapkan biaya penjualannya sesuai metode ini terpisah dari beban lainnya. Entitas harus mengungkapkan informasi tambahan berdasarkan sifat termasuk penyusutan dan beban imbalan kerja.

Tabel 2.3 Analisis Fungsi Beban

Pendapatan	x
Beban pokok penjualan	(x)
Laba bruto	x
Pendapatan operasi lainnya	x
Beban pemasaran	(x)
Beban umum dan administrasi	(x)
Beban operasi lain	(x)
Laba operasi	x

Sumber : SAK ETAP 2009

c) Laporan Perubahan Ekuitas

- (i) Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
- (ii) Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik

Tabel 2.4 Laporan Perubahan Ekuitas menurut SAK ETAP

Nama Usaha	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
Per 31 “Bulan” “Tahun”	
Laba ditahan 31 November 2011	xxx
Laba bersih Bulan Desember	<u>xxx</u>
Laba ditahan 31 Desember 2011	xxx

Sumber : SAK ETAP (2009)

d) Laporan Arus Kas

Paragraf 7.1 SAK ETAP (2009) Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

1) Aktivitas Operasi

Diperoleh dari aktivitas utama pendapatan entitas dan berasal dari transaksi peristiwa serta kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba/rugi. Pendapatan entitas adalah penjualan hasil panen bawang merah yang merupakan pendapatan utama.

2) Aktivitas Investasi

Mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Pembayaran kas untuk memperoleh asset tetap dan juga penjualan asset tetap merupakan salah satu aktivitas investasi. Salah satu aktivitas tersebut adalah ketiga petani membeli kendaraan yang akan digunakan sebagai sarana transportasi kegiatan operasional.

3) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan meliputi penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain serta pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham.

Tabel 2.5 Laporan Arus Kas menurut SAK ETAP

Nama Usaha	
LAPORAN ARUS KAS	
Per 31 “Bulan” “Tahun”	
Aktivitas Operasi	xxx
Aktivitas Investasi	xxx
Aktivitas Pendanaan	xxx

Sumber : SAK ETAP (2009)

- e) Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelas lainnya.

2.2.5.2 Elemen Laporan Keuangan

Elemen yang terkait langsung dengan pengukuran posisi keuangan dalam neraca adalah asset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan elemen yang berkaitan langsung dengan pengukuran kinerja dalam pendapatan dan pengeluaran (Schroeder. 2011:102):

a) Aset / *assets*

Sebuah sumber daya dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke perusahaan. Menurut IAI (2009) manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan secara langsung maupun tidak langsung terhadap aliran kas dan

setara kas. Aliran kas tersebut dapat terjadi melalui penggunaan aset atau pelepasan aset.

b) Kewajiban / *liability*

Sebuah kewajiban timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari perusahaan sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. Menurut IAI (2009) penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset lain, pemberian jasa ataupun penggantian kewajiban tersebut menjadi kewajiban lain atau konversi kewajiban menjadi ekuitas. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditur yang membebaskan atau membatalkan haknya.

c) Ekuitas / *equity*

Kepentingan residual dalam aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas dapat bertambah ketika saldo laba dan keuntungan diakui secara langsung dan juga dapat berkurang ketika kerugian diakui secara langsung dalam ekuitas. Pada perusahaan Perseroan Terbatas (PT), entitas terbagi menjadi beberapa subklasifikasi meliputi dana yang dikontribusikan oleh pemegang saham, saldo laba dan keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas.

d) Penghasilan / *income*

Merupakan seluruh perubahan *net assets* yang timbul dari kegiatan produksi berupa penjualan barang serta meningkatkan nilai aset dari arus

masuk atau penyelesaian kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Terbagi menjadi dua yaitu:

- 1). Pendapatan / *Revenue* adalah kegiatan yang timbul dari aktivitas operasional entitas yang belum dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan seperti penjualan.
- 2). Keuntungan / *Gain* adalah total penghasilan entitas yang sudah dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan biasanya terjadi diluar aktivitas operasional entitas seperti keuntungan penjualan tanah.

e) Beban / *expenses*

Merupakan penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar serta munculnya kewajiban dari penggunaan aktiva. Terbagi menjadi dua yaitu :

- 1). Beban / *Expenses* adalah besaran kas yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan suatu aktiva yang dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban dari sisi entitas seperti beban pokok penjualan, beban gaji dan beban penyusutan aktiva tetap.
- 2). Kerugian / *Loss* adalah pos lain yang memenuhi defines beban yang timbul dari aktivitas entitas dan disajikan terpisah pada laporan laba rugi seperti kerugian karena terjadi kebakaran gudang dan pencurian barang.

2.2.5.3 Standar Overloads

Penerapan akuntansi pada UKM masih sangat terbatas, penyebab rendahnya penerapan akuntansi di Indonesia adalah karena teknik dan proses akuntansi serta Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang digunakan sebagai dasar/pedoman penyusunan laporan keuangan dirasa memberatkan (*overload*) bagi UKM (Ramona. 2010). Beberapa kondisi yang mencerminkan adanya *overload* adalah sebagai berikut:

- 1) Terlalu banyak standar akuntansi yang terlalu rinci
- 2) Standar akuntansi bertujuan umum gagal membedakan kebutuhan dan penyajian untuk perusahaan besar dan UKM, entitas publik dan non publik
- 3) Pengukuran dan pengungkapan yang rumit.

Menurut Schroeder et all (2011:99) IASB menyoroti tentang isu standar akuntansi yang berlebihan dan permintaan internasional dari negara maju dan berkembang untuk membentuk aturan dan standar umum akuntansi untuk bisnis skala kecil dan menengah atau UMKM yang jauh lebih sederhana dari SAK yang berlaku saat ini. Pada tahun 2009, IASB menerbitkan sebuah IFRS dirancang untuk digunakan oleh entitas kecil dan menengah (UKM) yang mewakili lebih dari 95 persen dari semua perusahaan. Tujuannya untuk memberikan penyederhanaan serta prinsip akuntansi yang mandiri dan sesuai untuk perusahaan kecil dan didasarkan pada SAK yang berlaku saat ini dengan menghilangkan topik umum yang tidak relevan dengan UKM dan menyederhanakan metode untuk pengakuan dan pengukuran.

Beberapa dampak yang timbul antara lain (Schroeder et all. 2011: 99) :

- 1) Menghilangkan topik di IFRS yang tidak relevan dengan UKM.
- 2) Menyederhanakan prinsip untuk pengakuan dan pengukuran asset, kewajiban, penghasilan dan beban.
- 3) Mensyaratkan pengungkapan secara signifikan yang lebih sedikit.
- 4) Memberikan pilihan yang lebih mudah dalam kebijakan akuntansi.

2.2.5.4 Perbedaan SAK ETAP dan SAK Umum

Tabel 2.6 Perbedaan SAK ETAP dengan SAK Umum

No.	Perbedaan	SAK ETAP	SAK Umum
1	Penyajian Laporan Keuangan	Minimum pos yang ada di neraca lebih sedikit : <ul style="list-style-type: none"> - Laporan laba rugi tanpa harus menyajikan laporan laba rugi komprehensif - <i>Cash flow</i> dengan metode tidak langsung 	Dengan adanya ED PSAK 1 di masa depan penyajian laporan keuangan mengikuti IFRS dengan perubahan, seperti : <ul style="list-style-type: none"> - Laba rugi komprehensif - <i>Cash flow</i> metode langsung (dianjurkan) dan tidak langsung
2	Aset Tetap dan Properti Investasi	Asset tetap, properti investasi menggunakan metode biaya kecuali ada ketentuan pemerintah yang mengharuskan model revaluasi diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pilihan metode biaya atau revaluasi untuk asset tetap - Metode <i>fair value</i> untuk properti investasi
3	Aset Tidak Berwujud	<ul style="list-style-type: none"> - aset tidak berwujud diamortisasikan selama 10 tahun - pengukuran menggunakan metode biaya 	<ul style="list-style-type: none"> - aset tidak berwujud diamortisasi 20 tahun - Asset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tidak diamortisasi
4	Instrumen Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang lingkup ; investasi pada efek tertentu - Klasifikasi trading, <i>held to maturity</i> dan <i>available for sale</i> mengacu pada PSAK no.50 (1998) - Jauh lebih sederhana dibanding ketentuan PSAK 50 dan 55 revisi (2006) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang lingkup : asset dan kewajiban keuangan - Diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo - <i>Impayment</i> menggunakan <i>incurred loss concept</i> - <i>Hedging and derivative</i>

No	Perbedaan	SAK ETAP	SAK Umum
5	Persediaan	LIFO tidak diijinkan sedangkan ketentuan lainnya sesuai	LIFO tidak diijinkan (PSAK 14 Revisi 2008)
6	Penurunan Nilai Aset	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang lingkup yang meliputi semua jenis aset kecuali aset yang timbul dari manfaat pensiun - Tidak mengatur nilai penurunan goodwill - Ada tambahan penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang menggunakan PSAK 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang lingkup kecuali; persediaan, aset dari kontrak konstruksi, aset pajak tangguhan, aset dari manfaat pensiun - Penurunan nilai non persediaan - Penurunan nilai unit penghasil kas dan goodwill
7	Laporan Keuangan Konsolidasian	SAK ETAP tidak mengatur laporan keuangan konsolidasi	Diatur dalam PSAK 4
8	Sewa	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mengatur perjanjian yang mengandung sewa (PSAK 8) - Klarifikasi sewa; kombinasi <i>IFRS for SMEs</i> dan <i>SFAS 13 (rule based)</i> - Laporan keuangan <i>lessee</i> dan <i>lessor</i> menggunakan PSAK 30 (1990). 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengatur perjanjian yang mengandung sewa - Klasifikasi bersifat <i>principle based</i> - Laporan keuangan <i>lessee</i> dan <i>lessor</i>
9	Biaya Pinjaman	Biaya pinjaman langsung dibebankan	Terdapat komponen biaya pinjaman serta pengakuan dan kapitalisasi biaya pinjaman
10	Imbalan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak termasuk imbalan berbasis ekuitas - Untuk manfaat pasti menggunakan <i>PUC (Project Unit Credit)</i> dan jika tidak bisa, menggunakan metode yang disederhanakan 	<p>Menjelaskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imbalan kerja jangka pendek - Imbalan pasca kerja, untuk manfaat pasti menggunakan PUC - Imbalan jangka panjang lainnya - Pesangon pemutusan kerja
11	Pajak Penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan <i>tax payable concept</i> - Tidak ada pengakuan pengukuran pajak tangguhan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan <i>deffered tax concept</i> - Pengakuan dan pengukuran pajak kini serta pajak tangguhan

Sumber : www.himatansi.org

2.2.5.5 SAK ETAP pada Pos-Pos Laporan Keuangan

a) Kas dan setara kas

Tabel 2.7 Kas SAK ETAP

Laporan Keuangan	Definisi
Pengakuan	2.34 Aset diakui didalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya dimasa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Pengukuran	2.3 Dasar pengukuran biaya historis dan nilai wajar. - Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. - Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban.
Penyajian	- 4.2 Minimal mencakup pos-pos: kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi dan ekuitas - 4.5 Entitas harus menyajikan aset lancar dan tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sebagai satuan klasifikasi yang terpisah dalam neraca.
Pengungkapan	7.16 Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan menyajikan rekonsiliasi jumlah yang dilaporkan dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan dalam neraca.

Sumber : SAK ETAP (2009)

b) Persediaan

Tabel 2.8 Persediaan SAK ETAP

Laporan Keuangan	Definisi
Pengakuan	11.17 Jika persediaan dijual maka jumlah tercatatnya diakui sebagai beban periode dan pendapatan terkait diakui.
Pengukuran	11.3 Mengukur nilai persediaan pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dikurangi biaya penyelesaian untuk mendapatkan persediaan.

Laporan Keuangan	Definisi
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"> - 4.2 Minimal mencakup pos-pos : kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi dan ekuitas. - 4.5 Entitas harus menyajikan aset lancar dan tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sebagai satuan klasifikasi yang terpisah dalam neraca
Pengungkapan	11.19 Menjelaskan kebijakan akuntansi untuk mengukur persediaan, total persediaan yang tercatat dan klasifikasi, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode.

Sumber : SAK ETAP (2009)

c) Asset Tetap

Tabel 2.9 Aset Tetap dan Inventaris SAK ETAP

Laporan Keuangan	Definisi
Pengakuan	<ul style="list-style-type: none"> - 15.6 Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan. - 15.17 Beban penyusutan harus diakui oleh entitas. - 15.28 Entitas harus mengakui keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset tetap. - 22.13 Jika nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset kurang dari jumlah tercatatnya, maka entitas harus menurunkan jumlah tercatat aset pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan diakui sebagai rugi penurunan nilai.
Pengukuran	- 15.14 Diakui sebesar biaya perolehan dengan prinsip biaya historis, penyusutan diakui sebagai beban. Entitas harus mengakui biaya pemeliharaan sehari-hari (<i>cost of day to day servicing</i>) sebagai beban pada laporan laba rugi.
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"> - 15.14 Disajikan berdasarkan pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, estimasi kerugian penurunan nilai. - 17.12 Kewajiban sewa harus disajikan terpisah dari kewajiban yang lainnya.
Pengungkapan	15.31 Menjelaskan dasar pengukuran aset tetap dan inventaris, metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat, rekonsiliasi jumlah awal dan akhir periode dan penurunan nilai.

Sumber : SAK ETAP (2009)

d) Kewajiban

Tabel 2.10 Kewajiban SAK ETAP

Laporan Keuangan	Definisi
Pengakuan	2. Kewajiban diakui di neraca jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan dapat diukur dengan andal.
Pengukuran	2.3 Dasar pengukuran biaya historis dan nilai wajar. <ul style="list-style-type: none"> - Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar aset non kas yang diterima sebagai penukar kewajiban. - Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban.
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"> - 4.2 Minimal mencakup pos-pos : kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi dan ekuitas. - 4.5 Entitas harus menyajikan aset lancar dan tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sebagai satuan klasifikasi yang terpisah dalam neraca.
Pengungkapan	<ul style="list-style-type: none"> - 2.18 Penyelesaian kewajiban masa kini melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset lain - 8.1 Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Sumber : SAK ETAP (2009)

e) Modal

Tabel 2.11 Ekuitas SAK ETAP

Laporan Keuangan	Definisi
Pengakuan	<ul style="list-style-type: none"> - 19.3 Modal pokok berasal dari simpanan pokok anggota, simpanan lain, pinjaman dan penyesihan hasil usaha. - 19.10 Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau nilai wajar aset bukan kas yang diterima.

Laporan Keuangan	Definisi
Pengukuran	<ul style="list-style-type: none"> - 19.3 Modal pokok berasal dari simpanan pokok anggota, simpanan lain, pinjaman dan penyisihan hasil usaha. - 19.10 Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau nilai wajar aset bukan kas yang diterima.
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"> - 19.22 Penyajian modal dalam neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian entitas dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. - 19.23 Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor dinyatakan dalam neraca.
Pengungkapan	<ul style="list-style-type: none"> - 19.26 Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. - 19.35 Pengungkapan bagian lain ekuitas seperti saldo laba dilakukan secara terpisah sesuai perubahan selama periode pelaporan. - 8.1 Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Sumber : SAK ETAP (2009)

f) Saldo Laba

Tabel 2.12 Saldo Laba SAK ETAP

Laporan Keuangan	Definisi
Pengakuan	19.19 Bila dividen/keuntungan dibagikan dalam bentuk aset bukan kas, maka saldo laba akan didebit sebesar nilai wajar aset yang diserahkan.
Pengukuran	19.20 Pembagian dividen/ keuntungan berasal dari saldo laba yang diinvestasikan kembali oleh anggota dalam bentuk modal disetor.
Penyajian	19.28 Saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai pembagian keuntungan deviden sedangkan saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai deviden dilaporkan dalam akun tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan.
Pengungkapan	19.30 Pengungkapkan penjatahan dan pemisahan saldo laba. Peraturan, perikatan, pembatasan dan jumlah pembatasan saldo laba. Koreksi masa lalu baik bruto maupun neto setelah pajak.

Sumber : SAK ETAP (2009)

g) Pendapatan Operasional

Tabel 2.13 Pendapatan SAK ETAP

Laporan Keuangan	Definisi
Pengakuan	<ul style="list-style-type: none"> - 20.1 Pendapatan muncul sebagai akibat dari transaksi penjualan barang - 2.36 Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
Pengukuran	20.3 Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima. Nilai wajar tidak termasuk jumlah diskon dan potongan.
Penyajian	3.10 Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabung dengan jumlah yang memiliki sifat dan fungsi sejenis.
Pengungkapan	20.28 Entitas harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan termasuk metode yang diterapkan. Jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode timbul dari penjualan barang.

Sumber : SAK ETAP (2009)

h) Beban Operasional

Tabel 2.14 Beban Operasional SAK ETAP

Laporan Keuangan	Definisi
Pengakuan	2.33 Beban diakui dalam laporan laba rugi. Entitas harus menyusun laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut.
Pengukuran	<p>2.3 Dasar pengukuran biaya historis dan nilai wajar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya historis. Asset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh asset pada saat perolehan. - Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu asset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban.

Laporan Keuangan	Definisi
Penyajian	- 5.4 Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan keuangan laba rugi - 5.6 Entitas menyajikan suatu analisis beban dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas, mana yang memberi informasi yang lebih andal dan relevan.
Pengungkapan	5.8 Entitas mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi pengungkapan informasi tambahan berdasarkan sifat beban, termasuk penyusutan dan beban asmortisasi dan beban imbalan kerja. - 28.8 Jika terdapat transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka harus diungkapkan sifat dari hubungan tersebut dan informasi transaksi saldo untuk memahami dampak potensialnya dengan laporan keuangan.

Sumber : SAK ETAP (2009)

i) **Beban Pajak**

Tabel 2.15 Beban Pajak SAK ETAP

Laporan Keuangan	Definisi
Pengakuan	24.3 Entitas harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar.
Pengukuran	Diukur berdasarkan besarnya pendapatan dan beban tahun berjalan selama periode berjalan dan periode sebelumnya.
Penyajian	3.10 Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
Pengungkapan	24.4 Entitas mengungkapkan secara terpisah komponen-komponen utama beban pajak penghasilan.

Sumber : SAK ETAP (2009)

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.16 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian	Research Gap
1.	Eri Kristanto (2011)	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).	UMKM Pengrajin Rotan di Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi UMKM terhadap SAK ETAP masih kurang. 2. Dalam penyajian laporan keuangan, entitas belum sepenuhnya mematuhi SAK ETAP. 3. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu: kurangnya pengetahuan dalam menyusun laporan keuangan, entitas menganggap usahanya termasuk usaha kecil sehingga tidak memerlukan laporan keuangan. 	<p>Perbedaan terdapat pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian yaitu di sektor koperasi Pertanian. - Periode penelitian pada tahun 2012 dan semester I tahun 2013. <p>Penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang pemahaman dari aspek kuantitatif laporan keuangan yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.</p>
2.	Edi Susanto (2011)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).	UMKM di Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukuan yang dilakukan oleh UMKM masih sebatas laporan bisnis yang merupakan laporan yang disusun tidak dengan standar akuntansi keuangan. 	<p>Perbedaan terdapat pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian yaitu di sektor koperasi Pertanian. - Periode penelitian pada tahun 2012 dan semester I tahun 2013.

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian	<i>Research Gap</i>
				2. Entitas belum melakukan prosedur pembukuan dalam akuntansi (pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran). 3. UMKM belum menerapkan SAK ETAP. Entitas belum mampu menyajikan laporan keuangan sesuai SAK ETAP.	Penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang pemahaman dari aspek kuantitatif laporan keuangan yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
3.	Vica Wilani Putri Kaparang (2012)	Analisis Penerapan SAK ETAP pada Praktik Akuntansi Perbankan.	PT. BPR Dana Raya Manado	1. BPR Dana Raya tidak mengakui adanya transaksi seperti kas valuta asing. 2. Beberapa aturan SAK ETAP tidak diterapkan pada praktik akuntansi perbankan. 3. BPR Dana Raya belum memaksimalkan pengakuan pendapatan bunga secara akrual.	Peneliti sebelumnya fokus pada praktek akuntansi di BPR sedangkan penelitian ini pada pemahaman tentang objek tentang aspek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Perbedaan terdapat pada: - Objek penelitian yaitu di sektor koperasi Pertanian. - Periode penelitian pada tahun 2012 dan semester I tahun 2013.

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian	Research Gap
4.	Dita Swastika Ariyani (2012)	Analisis Penerapan SAK ETAP Pada UMKM.	Toko Angel Store.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pencatatan transaksi harian dilaporkan pada neraca dan laporan laba rugi. 2. Pencatatan yang dilakukan Toko Angel Store belum sesuai dengan SAK ETAP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian adalah koperasi pertanian. 2. Menelusuri pemahaman laporan keuangan di objek penelitian. 3. Periode penelitian pada laporan keuangan tahun 2012 dan Semester I tahun 2013.
5.	Iim Ma'rifatul Auliyah (2012)	Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP.	UKM Kampung Batik di Sidoarjo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan informan mengenai akuntansi belum sesuai dengan definisi akuntansi menurut AICPA yang merupakan teori acuan penelitian. 2. Sebagian besar pelaku UKM menerapkan akuntansi dan laporan keuangan secara sederhana. 3. Keberadaan SAK ETAP belum terlalu banyak diketahui namun para pelaku antusias dengan adanya SAK ETAP. 	<p>Penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang pemahaman pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.</p> <p>Perbedaan terdapat pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian yaitu di sektor Pertanian. - Periode penelitian pada tahun 2012 dan semester I tahun 2013.

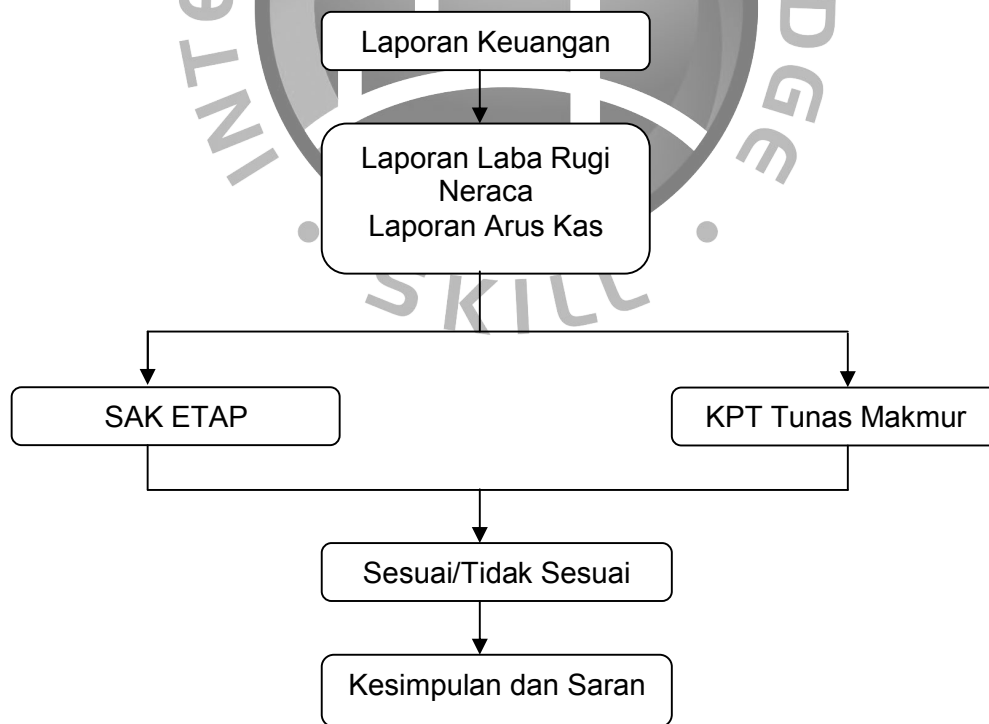
No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian	Research Gap
6.	Yane Devi Anna (2011)	Analisis Penerapan Akuntansi dan Laporan Keuangan.	Usaha Kecil dan Menengah di Sentra Industri Kaos Jawa Barat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar UMKM belum melakukan pencatatan dengan baik. 2. UMKM membuat laporan secara sederhana, hanya UMKM yang mendapat bantuan dana dari bank atau lembaga keuangan yang membuat laporan keuangan lengkap. 3. Laporan keuangan belum terlalu diperlukan, cukup dengan mencatat uang yang keluar 	<p>Peneliti sebelumnya meneliti tentang penerapan akuntansi pada umkm sedangkan penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang aspek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Perbedaan terdapat pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian yaitu di sektor koperasi Pertanian. - Periode penelitian pada tahun 2012 dan semester I tahun 2013.
7.	Hermon Adhy Putra dan Elisabeth Penti Kurniawati (2012)	Penyusunan Laporan Keuangan untuk UKM Berbasis SAK ETAP.	UMKM di Salatiga yang pada tahun 2010 mempunyai Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan adalah ketidakmampuan SDM dan kurangnya waktu karena difokuskan untuk operasional usaha. 2. Aplikasi <i>Microsoft Excel</i> dengan formula yang telah dirancah dapat mempermudah UKM untuk menghasilkan laporan keuangan berbasis SAK ETAP. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti sebelumnya menerapkan aplikasi <i>Microsoft Excel</i> untuk penerapan SAK ETAP. - Objek penelitian ini pada sektor koperasi pertanian dengan periode laporan keuangan tahun 2012 dan semester I 2013.

Sumber : Analisis Peneliti

2.4 Rerangka Pemikiran Penelitian

Peneliti membuat gambaran kegiatan sebagai rerangka pemikiran yang akan dilakukan untuk menyelesaikan penelitian ini. Dengan melakukan pengamatan terhadap laporan keuangan yang telah dibuat oleh KPT untuk memastikan apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan SAK ETAP. Kemudian peneliti melakukan uji kesesuaian untuk selanjutnya melakukan analisis dan pengolahan data dengan melihat langsung ke objek penelitian di KPT Tunas Makmur. Dengan mengetahui rincian biaya dan pendapatan serta catatan, diharapkan tercipta laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi yang sesuai standar akuntansi.

Gambar 2.5 Rerangka Pemikiran Penelitian



Sumber : Analisis Peneliti

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kelompok Pemuda Tani (KPT) Tunas Makmur yang ada di daerah Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. KPT Tunas Makmur merupakan sebuah Koperasi Pertanian di Desa Klampok yang berbadan hukum dengan terdaftar di Notaris setempat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggota dan mengembangkan usaha bersama.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah melihat penerapan SAK ETAP berdasarkan aspek kualitatif seperti dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan serta dari sisi laporan keuangan yang telah disusun oleh KPT Tunas Makmur apakah standar akuntansi yang digunakan sudah sesuai dengan SAK ETAP atau belum. Penulis melakukan tinjauan dan pengamatan langsung untuk mengetahui dan memahami kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan akuntansi berupa pembukuan ataupun catatan keuangan dari transaksi.

KPT Tunas Makmur juga bertujuan untuk memajukan pemuda tani yang saat ini terdiri dari 27 orang dan tergabung pada Himpunan Kelompok Tani (HKTI) Brebes. Diharapkan dengan bergabungnya pemuda tani dapat meningkatkan hasil panen mereka.

KPT Tunas Makmur memiliki beberapa asset seperti Tossa sebagai alat transportasi untuk mengangkut pembelian bibit hingga distribusi hasil panen.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, beberapa UMKM belum mampu menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar. Padahal laporan keuangan memegang peranan penting ketika mengajukan kredit baik kepada bank serta lembaga keuangan lain. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, KPT mampu menyajikan laporan keuangan lebih lengkap dan lebih baik.

Penelitian ini dimulai dengan menyusun pengajuan proposal dari awal bulan Februari sampai dengan pembahasan dan tahap akhir pengambilan kesimpulan pada bulan Juli 2013. Proses perijinan dilakukan pada bulan februari untuk memastikan penulis dapat melakukan penelitian di tempat tersebut.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Sekaran (2011: 60) data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama, sedangkan data sekunder mengacu pada informasi dari sumber informasi yang telah ada. Menurut Hariwijaya dan Triton (2011:57-58) data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama individu seperti dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram.

Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi langsung di KPT Tunas Makmur Brebes dan catatan ataupun pembukuan yang dilakukan. Narasumber utama berasal dari para petani yang

juga pengurus KPT Tunas Makmur yaitu Bapak Lutfi selaku Wakil Ketua KPT Tunas Makmur, Bapak Wachrudin dan Bapak Wiryadi selaku Bendahara dan Wakil Bendahara dan juga Bapak Suwarsono serta beberapa anggota dari kelompok tani seperti Ketua, Sekretaris serta beberapa pengurus dan anggota.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

a) Observasi

Adalah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti (Hariwijaya dan Triton, 2011:63). Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dari segi pengelolaan dan pembukuan keuangan hingga membuat laporan keuangan versi petani di KPT Tunas Makmur.

b) Wawancara

Wawancara atau *interview* dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa pengurus utama kelompok tani seperti Ketua, Wakil Ketua, Bendahara dan Wakilnya, Sekretaris dan beberapa pengurus dan anggota. Para petani yang menjadi narasumber wawancara ini dipastikan sudah dapat mewakili dari semua anggota kelompok tani yang berjumlah 27 orang.

Wawancara lebih difokuskan untuk mengetahui pemahaman petani tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang terdapat di laporan keuangan. Wawancara dilakukan langsung secara santai sehingga hubungan kekeluargaan lebih terasa dan narasumber dapat menjelaskan dengan detail. Sehingga diharapkan akan memperoleh data valid dan relevan yang nantinya dapat saling menguntungkan bagi peneliti dan narasumber di kelompok tani.

Berikut beberapa syarat pada saat melakukan wawancara menurut Hariwijaya dan Triton (2011:64-65):

- 1) Pewawancara mampu membina hubungan yang baik dengan responden dan mampu menjelaskan maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan.
 - 2) Pewawancara harus dapat menghindari diri dari pertanyaan yang bersifat mengarahkan atau menyarankan suatu jawaban.
 - 3) Pewawancara menguasai persoalan yang akan diteliti.
- c) Studi Pustaka

Adalah metode yang digunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal hingga akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan, seperti:

- 1) Jurnal, penelitian ilmiah terdahulu dan literatur yang terkait dengan masalah dan tujuan yang akan dibahas.
- 2) Buku-buku dan literatur tertulis lainnya yang dapat menunjang penelitian.

- 3) Beberapa sumber data resmi mengenai perkembangan pertanian bawang merah dan pertanian lainnya melalui media elektronik maupun media cetak serta website resmi dari internet.

d) Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan catatan-catatan pembukuan harian, catatan transaksi dari KPT Tunas Makmur dan pemasok serta laporan keuangan yang dibuat sebelumnya oleh Pengurus KPT Tunas Makmur.

Peneliti menetapkan prosedur penelitian yang akan digunakan untuk memudahkan proses penelitian dan dibagi menjadi beberapa tahapan berikut ini:

1. Tahap Penyusunan Proposal

Tahap ini merupakan langkah awal penelitian dengan mengajukan judul yang disertai dengan pembuatan proposal, sebelum pembuatan proposal peneliti sudah melakukan konfirmasi dengan KPT untuk mendapatkan izin terkait dengan adanya rencana penelitian ini. Sebelum diadakannya seminar proposal, peneliti melakukan studi lapangan (*field research*) ke lokasi penelitian guna memperoleh beberapa data penting yang harus disertakan di proposal.

2. Tahap Pengumpulan Data

Merupakan tahap penggalian data melalui observasi dan wawancara serta dokumentasi. Disini peneliti melakukan kegiatan lapangan untuk memperoleh

data dan fakta yang sebenarnya yang terkait dan relevan dengan penelitian sehingga memudahkan untuk melakukan analisis data.

3. Tahap Analisis Data

Dilakukan untuk mengelompokkan data agar data dapat disajikan secara rinci dan jelas yang sebelumnya dilakukan analisis data sehingga didapat pokok permasalahannya.

4. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian

Tahapan ini adalah langkah akhir dalam penelitian ini dimana semua data yang didapat disesuaikan dengan proposal yang telah disetujui. Dalam tahap ini dilakukan pula pengolahan data yang merupakan hasil dari pengumpulan data dan kemudian dilakukan analisis akhir.

3.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan deskriptif bersifat kualitatif. Menurut Sekaran (2010:105-107) metode deskriptif dilakukan agar peneliti mampu memahami karakteristik kelompok pada situasi tertentu dengan tetap berpikir secara sistematis, lengkap dan akurat yang bertujuan untuk menggambarkan aspek yang relevan dari sikap dan kegiatan individu, organisasi atau perusahaan. Jadi metode deskriptif dilakukan dengan meneliti suatu kelompok objek dalam situasi tertentu untuk mendapatkan gambaran secara sistematis mengenai fakta yang akurat.

Peneliti menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif dengan data yang berbentuk kalimat, tabel, skema dan gambar yang tidak terlalu menggunakan perhitungan secara statistik. Dengan memilih dan memfokuskan pada satu objek penelitian sebagai data utama, maka peneliti melakukan studi kasus di objek

penelitian tersebut. Sedangkan teknik penelitian ini adalah studi kasus. Peneliti melakukan studi lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data yang valid dan relevan dengan penelitian.

Penelitian ini melihat seberapa jauh para pelaku usaha kecil di koperasi tani memahami tentang laporan keuangan dan SAK ETAP yang berlaku untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Peneliti melihat dari pembukuan ataupun pencatatan transaksi serta laporan akuntansi yang dibuat oleh KPT.

Peneliti melakukan tinjauan ke KPT untuk mengetahui pemahaman petani tentang laporan keuangan dan SAK ETAP. Peneliti mendeskripsikan pemahaman petani mengenai laporan keuangan setelah melihat data dan informasi disesuaikan dengan pos-pos yang ada pada asset, kewajiban, ekuitas dan laba rugi. Kemudian dilakukan analisis dan disesuaikan dengan SAK ETAP yang relevan untuk pelaku usaha kecil.

Jika nantinya terdapat banyak akun-akun yang tidak sesuai dengan standar seperti diatas, maka akan dilakukan catatan dan penjelasan yang dapat digunakan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi yang berlaku. Dengan perumusan standar yang telah dijelaskan pada kajian teori diharapkan SAK ETAP mampu diterapkan oleh pelaku usaha kecil khususnya untuk sektor pertanian. Serta dengan adanya laporan keuangan yang sesuai standar untuk UMKM dan koperasi ini diharapkan dapat membantu program pemerintah yaitu sensus pertanian 2013 yang nantinya data yang ada dapat dimanfaatkan oleh pihak pemerintah untuk menyusun kebijakan serta menetapkan subsidi bagi sektor pertanian.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kelompok Pemuda Tani (KPT) Tunas Makmur merupakan objek dari penelitian ini, beralamat di Jalan Manijah 05 Rt 03 Rw 04 Desa Klampok Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. KPT adalah Koperasi Pertanian yang mencakup lingkup desa, merupakan organisasi non laba bertujuan mensejahterakan anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggota dan membangun usaha bersama untuk meningkatkan taraf hidup anggota. KPT terbentuk menjadi Koperasi Berbadan Hukum dengan Nomor Notaris 575 HT 0301 Tahun 2002 pada notaris Nur Leilani, SH. Seperti yang terdapat pada gambar 4.1 KPT Tunas Makmur merupakan anak dari Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Makmur yang saat ini sudah tidak aktif.

Gambar 4.1 Klasifikasi Organisasi Pertanian



Sumber : KPT Tunas Makmur

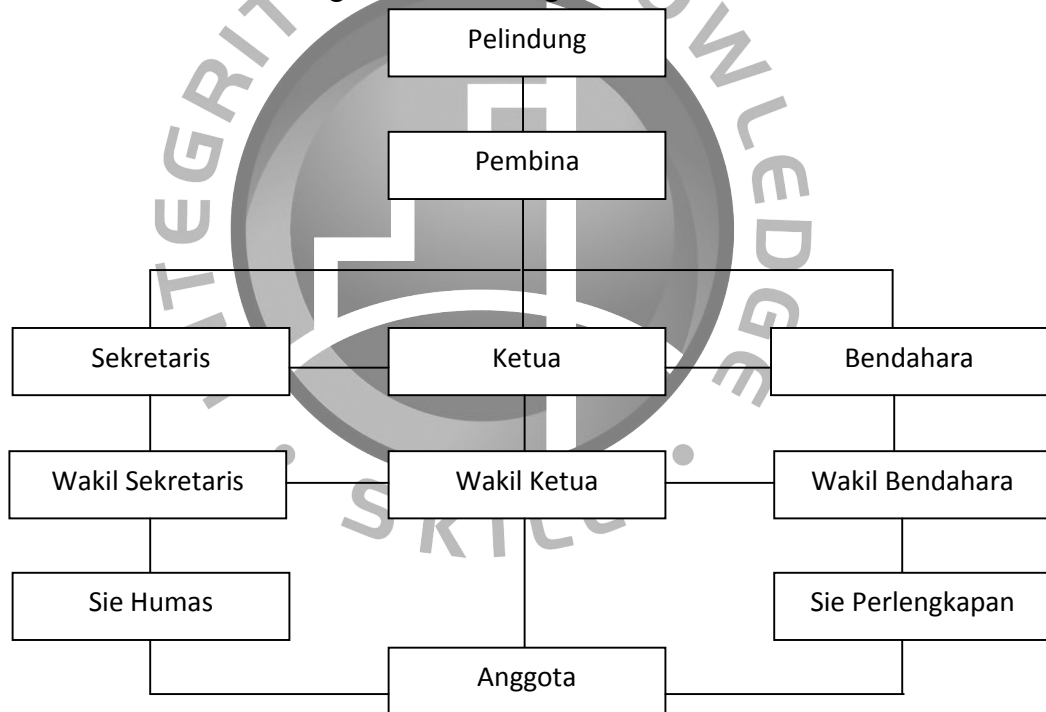
KPT Tunas Makmur resmi berdiri pada tanggal 27 Juni 2012 yang merupakan KPT pertama yang berdiri di Kabupaten Brebes dan di tahun 2013 tercatat baru ada tiga (3) KPT yang ada. Diresmikan oleh Bapak Masrukhi Bachro, selaku Ketua DPC HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Kabupaten Brebes, Bapak Agus Kuswo selaku PPL (Pegawai Pengawas Lapangan) Kecamatan Wanasari dan Bapak Sukwid selaku Kepala Desa Klampok serta dihadiri pula anggota yang sebagian besar adalah petani bawang merah dan padi.

Tujuan didirikannya KPT Tunas Makmur ini adalah memenuhi kebutuhan anggota kelompok diantaranya adalah menyediakan bibit unggul, garam tani, obat hama dan kebutuhan tani lainnya. Dengan bergabungnya petani muda dan petani lama diharapkan adanya sinergi untuk memajukan pertanian di Desa Klampok dan juga dapat meningkatkan hasil pertanian. Manfaat bagi petani yang bergabung diantaranya kemudahan mendapatkan bibit, pupuk dan obat hama yang berkualitas dengan harga yang lebih murah serta mempunyai kesempatan untuk memperoleh subsidi dari pemerintah. Selain pengalaman yang luas, anggota juga dapat membuat penangkaran bibit bersertifikat dan teruji kualitas. Semua anggota KPT mempunyai Kartu Anggota yang dibuat pada saat pendaftaran.

Gambar 4.2 Bagan Struktur Pengurus KPT Tunas Makmur menjelaskan alur dari pihak yang membutuhkan laporan keuangan yaitu dari Pelindung dan Pembina hingga seluruh anggota yang berjumlah 27 petani. Kepala desa yang berperan sebagai pelindung dan PPL Kecamatan Wanasari sebagai Pembina mewakili juga pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap KPT. Untuk menjalankan

fungsinya sebagai pengawas maka mereka membutuhkan pertanggung jawaban atas penggunaan modal dari berbagai pihak di KPT selama periode tertentu. Oleh karena itu KPT harus membuat laporan keuangan yang berisi informasi dari perputaran uang. Selain dari pihak PPL, pihak investor yang juga adalah anggota KPT juga membutuhkan laporan atas uang yang mereka tanam melalui iuran wajib bulanan dan iuran sukarela. Jika KPT mengajukan kredit ke bank, maka pihak bank juga membutuhkan laporan keuangan yang sesuai standar pelaporan yang berlaku.

Gambar 4.2 Bagan Struktur Pengurus KPT Tunas Makmur



Sumber : KPT Tunas Makmur

Susunan Pengurus Organisasi KPT Tunas Makmur

Pelindung : Sukwid selaku Kepala Desa Klampok
 Pembina : Ir. Masrukhi bachro selaku PPL Wanasari
 Ketua : Tasirin

Wakil Ketua	: M.Lutfi
Sekretaris	: Ali Rohman
Wakil Sekretaris	: A. Sholeh
Bendahara	: Wachrudin
Wakil Bendahara	: Wiryadi
Sie Humas	: 1. Hadi Purwanto 2. Tarjono 3. Sodikun
Sie Perlengkapan	: 1. Kaspui 2. Tarmidi 3. Darsono
Anggota	: 1. Rudi 2. Kastoro 3. Sutomo 4. Rakiman 5. Al Ikhlas 6. Samsudin 7. Sodikin 8. Aziz 9. Raspin 10. Saryad 11. Sugiarto 12. Nurhasyim 13. Ade Sudarno 14. Toto Sugiarto 15. Tohadi

Untuk mencapai tujuannya, KPT Tunas Makmur beserta Pembina dari PPL setiap bulan rutin mengadakan penyuluhan agar dapat saling bertukar informasi dan mampu meningkatkan hasil pertanian menjadi lebih baik lagi. Pada saat penyuluhan, semua anggota dapat menyalurkan keluhan dan kesulitan yang dihadapi. Ketika penyuluhan, mereka juga menyusun program pertanian baru yang tepat untuk diterapkan di Kelompok Tani melalui program SLPT yang salah satu syaratnya adalah menyertakan laporan keuangan organisasi.

Sejak didirikan satu tahun yang lalu, para petani yang tergabung sebagai anggota belum mampu membuat laporan keuangan yang lengkap dan sesuai standar. Namun setelah sering berdiskusi, beberapa petani sedikit demi sedikit mampu melakukan praktik akuntansi dan membuat laporan hasil penjualan panen mereka.

Sebagian besar pertanian di Kabupaten Brebes didominasi oleh tanaman pangan seperti padi yang menjadi unggulan dan hortikultura seperti bawang merah yang menjadi andalan dan juga *trademark* di Kabupaten Brebes. Pada tahun 2007, Kecamatan Wanasari menjadi penghasil tertinggi di Kabupaten Brebes dengan produktivitas 128,56 kw/ha atau dengan kata lain hampir mendekati 13 ton untuk 1 hektar lahan tanam.

Pada bulan Maret-April 2013 Indonesia mengalami kekurangan pasokan bawang merah. Permainan tengkulak, dihentikannya impor dan kelangkaan pasokan dari daerah mengakibatkan harga bawang merah melambung tinggi. Menurut KPT Tunas Makmur salah satu penyebabnya karena beberapa petani masih melakukan pola tanam bergantian yaitu petani lebih banyak menanam padi pada saat musim penghujan di bulan Januari-April dan lebih sedikit menanam bawang merah. Menurut KPT Tunas Makmur pada saat musim penghujan kualitas bawang merah yang dihasilkan menurun karena terlalu banyak pasokan air yang mengakibatkan tanaman bawang merah mudah rusak.

4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pembahasan Perumusan Masalah

4.2.1.1 Pembahasan Perumusan Pertama Sesuai dengan Hasil Wawancara, Dokumentasi dan Pengamatan

1. Pengakuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bendahara dan Wakil Bendahara KPT serta melakukan pengamatan pada laporan keuangan Neraca, penulis dapat menjawab rumusan masalah pertama mengenai pemahaman KPT tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sebagai berikut; Pengakuan kas pada saat terjadi transaksi yang manfaat ekonominya akan mengalir di masa depan. Pengakuan persediaan terjadi ketika ada barang yang masuk dan yang keluar, contohnya ketika pembelian dan penjualan bibit. Pengakuan aset tetap pada saat entitas membeli atau memperoleh aset tetap dari kegiatan transaksi, contohnya pada saat entitas membeli kendaraan dan diakui sebagai aset tetap entitas sebesar biaya perolehan. Entitas tidak mengakui adanya beban penyusutan karena kurangnya pemahaman. Menurut Bendahara KPT menjelaskan bahwa pengakuan hutang usaha pada saat jatuh tempo sedangkan pengakuan modal KPT berdasarkan pada modal pokok dari iuran wajib dan iuran sukarela anggota.

Berdasarkan pos-pos yang terdapat di laporan laba rugi, pengakuan saldo laba adalah pada saat entitas memperoleh keuntungan bersih atas kegiatan usaha. Entitas mengakui pendapatan ketika terjadi penjualan

barang dan diakui menggunakan dasar *cash basis*. Pengakuan beban menggunakan dasar *cash basis* yaitu beban diakui sebesar kas yang dikeluarkan untuk menyelesaikan beban.

2. Pengukuran

Peneliti melakukan wawancara dengan Wakil Ketua KPT dan melakukan pengamatan pada pos-pos di Neraca untuk dapat menjawab rumusan pertama pada poin kedua yaitu aspek pengukuran. Pengukuran kas menggunakan metode biaya historis dan tidak diukur dengan nilai wajar, contoh pada saat pembelian bibit, entitas menggunakan biaya satu hari sebelumnya padahal keesokan harinya harga bibit berubah. Pengukuran persediaan berdasarkan nilai perolehan barang pada saat pertama kali. Asset tetap diakui di awal sebesar biaya perolehan, setelah itu entitas melakukan pengukuran terhadap biaya pemeliharaan disesuaikan dengan biaya historis. Pengukuran kewajiban didasarkan atas biaya historis yang dicatat sebesar kas yang diterima atau yang dikeluarkan sedangkan pengukuran modal KPT diukur sebesar jumlah uang kas atau non kas yang diterima.

Berdasarkan pos-pos yang terdapat di laporan laba rugi, pengukuran saldo laba sebesar total pendapatan entitas setelah dikurangi dengan semua beban sedangkan pengukuran pendapatan sebesar nilai wajar yang disesuaikan dengan kondisi dan harga pasar karena setiap harinya harga barang selalu berubah. Tetapi untuk pengukuran beban sebesar biaya historis tidak disesuaikan dengan nilai wajar seperti pada saat membayar beban gaji.

3. Penyajian

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di Neraca pada poin tiga yaitu penyajian, menjelaskan bahwa kas dan persediaan disajikan pada pos tersendiri di Neraca laporan keuangan sedangkan kewajiban pada sisi pasiva. Penyajian aset tetap sebesar pengakuan awal pada biaya perolehan dan tidak ada penyajian akumulasi penyusutan aset tetap. Penyajian modal pada neraca sesuai dengan besarnya modal dan penambahan modal pada periode tertentu sedangkan pendapatan yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan.

Berdasarkan pos-pos di laporan laba rugi, pemahaman tentang aspek penyajian masih sangat rendah seperti pada tidak adanya pemisahan batas penyajian saldo laba yang dibagikan dan yang dilaporkan sebagai dalam bentuk cadangan modal, tidak ada pemisahan penyajian pendapatan untuk pos-pos yang material dan tidak ada penyajian terpisah berdasarkan analisis fungsi dan sifat beban menunjukkan pemahaman yang masih kurang tentang aspek penyajian.

4. Pengungkapan

Berdasarkan Bendahara KPT dan pengamatan pada pos-pos yang terdapat di neraca dapat diketahui bahwa entitas tidak melakukan pengungkapan mengenai komponen kas dan rekonsiliasi jumlah kas serta pengungkapan kebijakan yang dipakai entitas dalam mengukur persediaan dan tidak ada tambahan informasi mengenai persediaan yang diakui sebagai beban selama periode. Pada aset tetap, tidak ada pengungkapan mengenai

estimasi umur manfaat, metode penyusutan dan rekonsiliasi jumlah awal dan akhir. KPT memang tidak membuat catatan atas laporan keuangan yang berisi pengungkapan tambahan informasi mengenai kewajiban dan modal KPT sedangkan perubahan modal hanya dicatat pada besarnya modal berjalan.

Berdasarkan pos-pos yang terdapat di laporan laba rugi, penjelasan mengenai saldo laba hanya pada laporan laba rugi dan tidak terdapat pengungkapan atas koreksi masa lalu. Pemahaman KPT dari aspek pengungkapan sangat rendah tercermin dari tidak ada informasi tambahan yang mampu menjelaskan bagaimana pengungkapan pendapatan, klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifatnya.

Berikut laporan keuangan yang dibuat oleh KPT Tunas Makmur :

a. Neraca

Laporan keuangan berupa neraca menyajikan informasi tentang kepemilikan aset, kewajiban dan ekuitas petani pada periode tertentu.

Informasi yang disajikan KPT dalam neraca adalah sebagai berikut :

- a. Kas dan setara kas
- b. Persediaan
- c. Peralatan
- d. Asset tetap
- e. Utang usaha
- f. Ekuitas

Penulis menyajikan Neraca yang telah disusun oleh entitas yaitu per 31 Desember 2012 dan Per 31 Mei 2013. Berikut ini adalah Neraca yang disajikan untuk tanggal pelaporan 31 Desember 2012 :

Tabel 4.1 Neraca Tahun 2012

KPT Tunas Makmur Neraca Per 31 Desember 2012 (Rp)			
Aset		Hutang dan Modal	
Kas	2.600.000	Hutang	2.800.000
Persediaan	30.700.000		
Peralatan	5.000.000	Modal	35.500.000
Total Aset	38.300.000	Total Hutang dan Modal	38.300.000

Sumber : KPT Tunas Makmur

Berikut ini adalah Neraca yang disajikan untuk tanggal pelaporan 31 Mei 2013 :

Tabel 4.2 Neraca 31 Mei 2013

KPT Tunas Makmur Neraca Per 31 Mei 2013 (Rp)			
Aset		Hutang dan Modal	
Kas	6.800.000	Hutang	6.300.000
Persediaan	37.500.000		
Peralatan	5.500.000	Modal	61.500.000
Kendaraan	18.000.000		
Total Aset	67.800.000	Total Hutang dan Modal	67.800.000

Sumber : KPT Tunas Makmur

b. Laporan Laba Rugi

Informasi yang terdapat pada Laporan Laba Rugi KPT adalah sebagai berikut :

- Pendapatan
- Beban keuangan
- Laba atau rugi neto

Penulis menyajikan Laporan Laba Rugi yang telah disusun oleh entitas yaitu 31 Desember 2012 dan 31 Mei 2013. Berikut ini adalah Neraca yang disajikan untuk tanggal pelaporan 31 Desember 2012 :

Berikut adalah Laporan Laba Rugi untuk tanggal pelaporan 31 Desember 2012 :

Tabel 4.3 Laporan Laba Rugi Tahun 2012

Laporan Laba Rugi 31 Desember 2013		
Penjualan		72.000.000
Harga Pokok Penjualan		<u>45.000.000</u> –
Biaya Operasional :		
Biaya Sewa Tanah	3.000.000	
Biaya Gaji	6.000.000	
Biaya Tanam	1.440.000	
Biaya Transportasi	3.000.000	
Biaya Perlengkapan	1.400.000	
Biaya konsumsi	<u>1.200.000</u> +	
Total Biaya Operasional		<u>16.440.000</u> –
Laba Bersih		10.960.000

Sumber : KPT Tunas Makmur

Berikut adalah Laporan Laba Rugi untuk tanggal pelaporan 31 Mei 2013 :

Tabel 4.4 Laporan Laba Rugi 31 Mei 2013

Laporan Laba Rugi 31 Mei 2013		
Penjualan		128.000.000
Harga Pokok Penjualan		<u>77.320.000</u> –
Biaya Operasional :		
Biaya Sewa Tanah	4.500.000	
Biaya Gaji	7.500.000	
Biaya Tanam	1.700.000	
Biaya Transportasi	4.500.000	
Biaya Perlengkapan	1.062.000	
Biaya konsumsi	<u>1.900.000</u> +	
Total Biaya Operasional		<u>21.162.000</u> –
Laba Bersih		29.518.000

Sumber : KPT Tunas Makmur

Terlihat bahwa pada laporan laba rugi semua beban dikumpulkan berdasarkan kegiatan operasional. Beban yang diakui dan disajikan di laporan laba rugi adalah keseluruhan biaya yang harus ditanggung entitas sebelum melakukan penjualan. Tidak ada pengungkapan atas klasifikasi beban dan pengungkapan pendapatan.

c. Laporan Arus Kas

Dalam penyusunan laporan arus kas, KPT menggunakan metode langsung dalam menyusun laporan keuangan arus kas yaitu arus kas kegiatan operasi ditentukan dari hasil total penjualan dikurangi dengan semua beban yang digunakan dalam kegiatan operasional.

Tabel 4.5 Laporan Arus Kas Tahun 2012

Laporan Arus Kas 31 Desember 2012 (Rp)	
Aktivitas Operasi	
Penjualan Tunai	72.000.000
Pembelian Bahan Baku Tunai	27.900.000
Pembayaran Gaji	7.440.000
Pembayaran Transportasi	3.000.000
Pembayaran Sewa Tanah	4.200.000
Pembayaran Perlengkapan	1.400.000
Pembayaran hutang dengan kas	<u>560.000 -</u>
Jumlah kas dari aktivitas operasi	27.500.000
Aktivitas Investasi	
Pembelian perlengkapan	5.000.000
Aktivitas Pendanaan	
Pembayaran kas hasil usaha	<u>19.900.000 -</u>
Kas akhir periode	2.600.000

Sumber : KPT Tunas Makmur

Berikut adalah Laporan Arus Kas untuk tanggal pelaporan 31 Mei 2013 :

Tabel 4.6 Laporan Arus Kas 31 Mei 2013

Laporan Arus Kas 31 Mei 2013 (Rp)	
Aktivitas Operasi	
Penjualan Tunai	128.000.000
Pembelian Bahan Baku Tunai	71.020.000
Pembayaran Gaji	9.200.000
Pembayaran Transportasi	4.500.000
Pembayaran Sewa Tanah	6.400.000
Pembayaran Perlengkapan	1.062.000
Pembayaran hutang dengan kas	<u>1.438.000 -</u>
Jumlah kas dari aktivitas operasi	34.380.000
Aktivitas Investasi	
Pembelian perlengkapan	500.000
Pembelian kendaraan	<u>18.000.000 +</u>
Jumlah kas dari aktivitas investasi	18.500.000

Aktivitas Pendanaan	
Pembayaran kas hasil usaha	9.080.000 -
Kas akhir periode	6.800.000

Sumber : KPT Tunas Makmur

Dalam SAK ETAP laporan arus kas dibuat menggunakan metode tidak langsung dimana laba neto disesuaikan dengan mengoreksi dengan dampak dari transaksi non kas dan penangguhan dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dimasa lalu dan masa depan.

4.2.1.2 Kesesuaian Penerapan Standar Akuntansi Keuangan dengan SAK

ETAP

1. Kas dan setara kas

Berikut adalah pemahaman KPT yang disesuaikan dengan SAK ETAP, kemudian dilakukan analisis untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Kas diakui pada saat sejumlah uang masuk dan dikeluarkan untuk memenuhi transaksi. Kemudian kas dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan untuk transaksi tersebut. Kas disajikan dalam pos tersendiri pada neraca setiap akhir periode. Hanya terdapat kas ditangan dan tidak terdapat kas di bank.

Tabel 4.7 Kas dan Setara Kas SAK ETAP dan KPT

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
Pengakuan : - 2.34 Aset diakui didalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya dimasa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.	Kas diakui dalam neraca sebesar nilai nominal pada transaksi, kejadian atau keadaan yang mempengaruhi aset.	Sudah sesuai dengan SAK ETAP, kas yang mengalir dimasa depan akan memberikan manfaat ekonomi.

<p>Pengukuran :</p> <p>2.3 Dasar pengukuran biaya historis dan nilai wajar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. - Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban. 	<p>Pengukuran kas menggunakan biaya historis sebesar kas yang dibayarkan atau yang diterima pada saat terjadinya transaksi.</p>	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena kas diukur hanya berdasarkan biaya historis sejumlah kas yang dibayarkan dan tidak berdasarkan nilai wajar sejumlah yang dipakai untuk mempertukarkan aset atau menyelesaikan kewajiban. Contoh pada saat entitas pembelian bibit yang menggunakan biaya historis, sedangkan nilai wajar barang berubah setiap saat.</p>
<p>Penyajian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.2 Minimal mencakup pos-pos: kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi dan ekuitas - 4.5 Entitas harus menyajikan aset lancar dan tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sebagai satuan klasifikasi yang terpisah dalam neraca. 	<p>Kas disajikan pada pos tersendiri pada laporan keuangan.</p>	<p>Tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP karena entitas tidak mencakup pos-pos minimal serta tidak dapat menyajikan klasifikasi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang</p>
<p>Pengungkapan :</p> <p>7.16 Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan menyajikan rekonsiliasi jumlah yang dilaporkan dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan dalam neraca.</p>	<p>KPT menghitung kas keluar dan masuk saja tidak ada catatan atas laporan keuangan</p>	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena entitas hanya menyajikan laporan kas masuk dan keluar, tidak dapat menyajikan rekonsiliasi secara keseluruhan.</p>

Sumber : Analisis Peneliti

2. Persediaan

Dari pembahasan rumusan satu diketahui KPT tidak memahami tentang penilaian persediaan yang ada. Persediaan berupa bahan baku utama yang digunakan untuk produksi barang didapatkan dengan harga perolehan dan tidak ditambah dengan biaya lainnya. Tidak adanya informasi tambahan yang menjelaskan bagaimana pengakuan dan pengukuran persediaan membuat entitas tidak dapat mengungkapkan persediaan dengan baik.

Tabel 4.8 Persediaan SAK ETAP dan KPT

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
<p>Pengakuan : 11.17 Jika persediaan dijual maka jumlah tercatatnya diakui sebagai beban periode dan pendapatan terkait diakui</p>	<p>Penjualan persediaan diakui sebagai pendapatan beban periode.</p>	<p>Sudah sesuai dengan SAK ETAP karena pada saat persediaan dijual akan diakui sebagai pendapatan dan beban. Contoh penjualan bibit, sejumlah bibit yang terjual diakui sebagai pendapatan dan biaya transportasi untuk mengangkutnya diakui sebagai beban.</p>
<p>Pengukuran : 11.3 Mengukur nilai persediaan pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dikurangi biaya penyelesaian untuk mendapatkan persediaan.</p>	<p>Persediaan diukur pada nilai perolehan saja.</p>	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP, karena persediaan diukur dengan biaya perolehan. Contoh pada saat pembelian persediaan diukur sesuai dengan biaya perolehan, entitas tidak mengukur adanya biaya penyelesaian.</p>

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
<p>Penyajian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.2 Minimal mencakup pos-pos : kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi dan ekuitas. - 4.5 Entitas harus menyajikan aset lancar dan tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sebagai satuan klasifikasi yang terpisah dalam neraca. 	KPT menyajikan persediaan dan aset lancar lainnya	Tidak sesuai dengan SAK ETAP, entitas tidak mencakup pos-pos minimal dan tidak ada klasifikasi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang
<p>Pengungkapan :</p> <p>11.19 Menjelaskan kebijakan akuntansi untuk mengukur persediaan, total persediaan yang tercatat dan klasifikasi, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode.</p>	Entitas mengungkapkan kebijakan untuk mengukur persediaan dengan metode FIFO	Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena entitas tidak memenuhi syarat yang harus diungkapkan yaitu tidak menggunakan rumus biaya dan tidak menjelaskan jumlah persediaan, total persediaan yang tercatat.

Sumber : Analisis Peneliti

3. Asset Tetap

Pada pembahasan rumusan masalah yang pertama diketahui tingkat pemahaman KPT tentang aset tetap masih rendah, untuk membuktikannya maka penulis melakukan analisis yang dibandingkan dengan SAK ETAP. Aset tetap merupakan asset berwujud yang digunakan untuk kegiatan produksi dan kegiatan lainnya yang digunakan dalam beberapa periode berjalan berupa tassa kendaraan bermotor bak terbuka yang digunakan sebagai sarana transportasi. Aset tetap diakui sebesar harga perolehan namun tidak menghitung biaya

penyusutan dan penurunan nilai. Sehingga dari aspek pengakuan saja yang sudah sesuai SAK ETAP. Pengukuran, penyajian dan pengungkapan masih belum sesuai dengan ketentuan SAK ETAP.

Tabel 4.9 Aset Tetap SAK ETAP dan KPT

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
<p>Pengakuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15.6 Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan - 15.17 Beban penyusutan harus diakui oleh entitas - 15.28 Entitas harus mengakui keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset tetap. - 22.13 Jika nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset kurang dari jumlah tercatatnya, maka entitas harus menurunkan jumlah tercatat aset pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan diakui sebagai rugi penurunan nilai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aset tetap diakui sebesar biaya perolehan - KPT tidak mengakui beban penyusutan aset tetap. - Sejauh ini KPT tidak melakukan penghentian pengakuan aset. - Aset tetap masih digunakan untuk kegiatan di KPT dan tidak ada aset yang dijual 	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena entitas tidak mengakui penyusutan aset tetap yang seharusnya diakui tiap tahun selama periode berjalan.</p>
<p>Pengukuran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15.14 Diakui sebesar biaya perolehan dengan prinsip biaya historis, penyusutan diakui sebagai beban. Entitas harus mengakui biaya pemeliharaan sehari-hari (<i>cost of day to day servicing</i>) sebagai beban pada laporan laba rugi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aset tetap diukur berdasarkan biaya historis pada saat awal pembelian - KPT mengukur biaya pemeliharaan sehari-hari sebagai beban dari biaya transportasi - KPT tidak mengukur besarnya akumulasi penyusutan aset tetap 	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP, entitas mengukur biaya perawatan sehari-hari sebagai beban pada laporan laba rugi tetapi entitas tidak menghitung biaya penyusutan aset tetap dan tidak mengukur nilai dari awal sampai akhir periode</p>

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
<p>Penyajian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15.14 Disajikan berdasarkan pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, estimasi kerugian penurunan nilai. - 17.12 Kewajiban sewa harus disajikan terpisah dari kewajiban yang lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aset tetap disajikan sebesar pengakuan awal dengan biaya perolehan tanpa dikurangi biaya penyusutan dan estimasi kerugian penurunan nilai - KPT melakukan sewa aset tetap seperti sewa kendaraan tetapi tidak menyajikan pada aset tetap ataupun kewajiban 	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP, karena entitas hanya menyajikan perhitungan pada pengakuan awal saja dan tidak menyajikan perhitungan selama periode berjalan mengenai nilai aset tetap baik itu dari penyusutan maupun dari estimasi penurunan nilai di masa mendatang serta tidak menyajikan kewajiban sewa.</p>
<p>Pengungkapan :</p> <p>15.31 Menjelaskan dasar pengukuran aset tetap dan inventaris, metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat, rekonsiliasi jumlah awal dan akhir periode dan penurunan nilai.</p>	<p>KPT tidak melakukan dasar pengukuran aset tetap serta estimasi umur manfaat, KPT hanya menggunakan aset tetap untuk kegiatan dan tidak menjelaskan rekonsiliasi aset tetap dari awal hingga periode akhir.</p>	<p>Tidak sesuai SAK ETAP karena tidak ada penjelasan mengenai penghitungan nilai (rekonsiliasi) awal hingga akhir periode dan tidak melakukan penghitungan atas beban penyusutan dan penurunan nilai</p>

Sumber : Analisis Peneliti

4. Kewajiban

Berdasarkan pembahasan rumusan masalah yang pertama tentang kewajiban, penulis melakukan analisis dan membandingkan penerapannya dengan SAK ETAP. Kewajiban diakui berdasarkan biaya historis yaitu sesuai dengan kesepakatan pada saat terjadinya transaksi atau peristiwa. KPT tidak memisahkan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Tabel 4.10 Kewajiban SAK ETAP dan KPT

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
<p>Pengakuan : 2.35 Kewajiban diakui di neraca jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan dapat diukur dengan andal.</p>	<p>Kewajiban diakui pada saat kewajiban jatuh tempo dan sumber daya dikeluarkan untuk menyelesaikan kewajiban</p>	<p>Sudah sesuai dengan SAK ETAP karena kemungkinan pengeluaran sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban masa kini.</p>
<p>Pengukuran : 2.3 Dasar pengukuran biaya historis dan nilai wajar. - Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar aset non kas yang diterima sebagai penukar kewajiban. - Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban</p>	<p>Pengukuran menggunakan biaya historis dari transaksi atau peristiwa masa lalu, aset telah diserahkan atau entitas telah membuat perjanjian sebesar kas yang diterima sebagai penukar kewajiban pada saat terjadi.</p>	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena entitas hanya mengakui kewajiban berdasarkan biaya historis pada saat terjadinya kesepakatan transaksi dan tidak mengakui sebesar nilai wajar.</p>
<p>Penyajian : - 4.2 Minimal mencakup pos-pos : kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, asset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi dan ekuitas.</p>	<p>- Penyajian oleh KPT tidak mencakup pos-pos minimal yang disyaratkan - Entitas tidak menyajikan pemisahan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang</p>	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena masih belum mencakup pos-pos minimal serta tidak terdapat klasifikasi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang</p>

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
- 4.5 Entitas harus menyajikan aset lancar dan tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sebagai satuan klasifikasi yang terpisah dalam neraca.		
Pengungkapan : - 2.18 Penyelesaian kewajiban masa kini melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset lain - 8.1 Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.	- Kewajiban diselesaikan dengan pembayaran kas sebesar jumlah yang harus diselesaikan. - KPT tidak membuat catatan atas laporan keuangan	Tidak Sesuai dengan ketentuan SAK ETAP karena entitas tidak mengungkapkan jumlah kewajiban yang dilunasi dan kewajiban yang masih harus diakui baik jangka pendek maupun jangka panjang

Sumber : Analisis Peneliti

5. Modal

Berdasarkan pemahaman KPT tentang modal, penulis melakukan analisis dengan membandingkannya berdasarkan SAK ETAP. Modal berasal dari modal pokok berupa iuran wajib dan iuran sukarela dari seluruh anggota dan pengurus KPT. Dengan adanya laporan keuangan yang lengkap, diharapkan KPT mampu mendapatkan tambahan modal dari pemerintah baik itu berupa subsidi modal ataupun pinjaman modal dengan bunga rendah.

Tabel 4.11 Modal SAK ETAP dan KPT

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
Pengakuan : - 19.3 Modal pokok berasal dari simpanan pokok anggota, simpanan lain, pinjaman dan penyisihan hasil usaha.	- Modal pokok berasal dari iuran wajib dan iuran sukarela anggota. - Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan uang yang diterima	Sudah sesuai dengan SAK ETAP karena modal yang diakui adalah modal pokok dari iuran wajib dan iuran sukarela serta modal disetor

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
<ul style="list-style-type: none"> - 19.10 Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau nilai wajar aset bukan kas yang diterima. 		
<p>Pengukuran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 19.3 Modal pokok berasal dari simpanan pokok anggota, simpanan lain, pinjaman dan penyisihan hasil usaha. - 19.10 Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau nilai wajar aset bukan kas yang diterima. 	<p>Modal diukur sebesar jumlah uang kas yang diterima serta penambahan modal baik berupa kas maupun asset non kas.</p>	<p>Sudah sesuai SAK ETAP karena KPT menghitung modal dari kas yang diterima dan penambahan modal disetor</p>
<p>Penyajian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 19.22 Penyajian modal dalam neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian entitas dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. - 19.23 Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor dinyatakan dalam neraca. 	<ul style="list-style-type: none"> - Modal disajikan tidak berdasarkan akta pendirian - Modal disajikan sesuai dengan besarnya modal berupa uang tunai yang terkumpul pada periode tertentu. 	<p>Tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP karena entitas tidak menyajikan modal sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku pada saat pendirian KPT.</p>
<p>Pengungkapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 19.26 Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. - 19.35 Pengungkapan bagian lain ekuitas seperti saldo laba dilakukan secara terpisah sesuai perubahan selama periode pelaporan. - 8.1 Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan modal hanya dicatat pada besarnya modal berjalan dan tidak diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. - Saldo laba disajikan pada pos modal tetapi nilainya terpisah dari modal. - KPT tidak membuat catatan atas laporan keuangan. 	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena tidak adanya penghitungan dan rincian klasifikasi modal. Entitas tidak menampilkan secara terpisah antara modal dan saldo laba serta tidak ada alokasi laba ditahan. Laba ditahan, perubahan modal tidak diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.</p>

Sumber : Analisis Peneliti

6. Saldo Laba

Berdasarkan pemahaman KPT tentang saldo laba, penulis berusaha menjawab rumusan masalah kedua dengan melakukan analisis berdasarkan ketentuan SAK ETAP. Saldo laba yang dibagikan ke anggota dalam bentuk kas.

Tabel 4.12 Saldo Laba SAK ETAP dan KPT

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
<p>Pengakuan : 19.19 Bila dividen/keuntungan dibagikan dalam bentuk aset bukan kas, maka saldo laba akan didebit sebesar nilai wajar aset yang diserahkan.</p>	Dividen/keuntungan dalam bentuk kas diakui sebesar nilai wajar	Sudah sesuai dengan SAK ETAP karena pembagian keuntungan/dividend dalam bentuk kas sebesar nilai wajar. Contoh pada saat pembagian dividen keuntungan dibagikan dalam bentuk kas kepada para anggota.
<p>Pengukuran : 19.20 Pembagian dividen/keuntungan berasal dari saldo laba yang diinvestasikan kembali oleh anggota dalam bentuk modal disetor.</p>	Dividen / keuntungan dibagikan ke anggota sebesar kas yang tersisa di saldo laba	Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena deviden/keuntungan yang dibagikan ke anggota berasal dari sisa saldo laba dan tidak diinvestasikan kembali dalam bentuk modal disetor
<p>Penyajian : 19.28 Saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai pembagian keuntungan deviden sedangkan saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai deviden dilaporkan dalam akun tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan.</p>	Saldo laba disajikan tersendiri dalam bentuk cadangan yang dinyatakan terpisah dari modal dan dibagikan sebagai keuntungan hasil usaha para anggota.	Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena tidak ada pemisahan batas antara saldo laba yang dibagikan dan yang dilaporkan sebagai pencadangan modal.

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
Pengungkapan: 19.30 Pengungkapkan penjatahan dan pemisahan saldo laba. Peraturan, perikatan, pembatasan dan jumlah pembatasan saldo laba. Koreksi masa lalu baik bruto maupun neto setelah pajak.	Tidak ada koreksi masa lalu yang mencerminkan pengungkapan saldo laba dan tidak terdapat pemisahan saldo laba	Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena entitas tidak mengungkapkan pemisahan saldo laba dan koreksi masa lalu.

Sumber : Analisis Peneliti

7. Pendapatan Operasional

Berdasarkan pemahaman KPT tentang pendapatan, penulis berusaha menjawab rumusan masalah kedua dengan melakukan analisis berdasarkan ketentuan SAK ETAP. Pendapatan diperoleh dari penjualan hasil panen bawang merah. Pengukuran pendapatan berdasarkan nilai wajar yang disesuaikan dengan kondisi pasar.

Tabel 4.13 Pendapatan SAK ETAP dan KPT

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
Pengakuan : - 20.1 Pendapatan muncul sebagai akibat dari transaksi penjualan barang - 2.36 Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.	- Pendapatan utama yang diakui dari penjualan - Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi	Sudah sesuai dengan SAK ETAP, KPT mengakui adanya pendapatan pada saat terjadi transaksi penjualan barang dan terdapat keniakan manfaat ekonomi di masa depan.

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
<p>Pengukuran : 20.3 Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima. Nilai wajar tidak termasuk jumlah diskon dan potongan.</p>	<p>Pendapatan KPT dinilai dari besarnya nilai wajar atas pembayaran yang diterima disesuaikan dengan kondisi pasar dan tidak menghitung adanya diskon dan potongan penjualan</p>	<p>Sudah sesuai dengan SAK ETAP, entitas mengukur berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima dari hasil penjualan barang dan tidak termasuk diskon dan potongan.</p>
<p>Penyajian : 3.10 Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabung dengan jumlah yang memiliki sifat dan fungsi sejenis.</p>	<p>Pendapatan dari penjualan disajikan pada laporan laba rugi dan laporan arus kas</p>	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena tidak ada pemisahan antara pos yang material dan yang tidak material. Contoh pendapatan penjualan bibit yang material digabung dengan pendapatan penjualan karung pembungkus bibit.</p>
<p>Pengungkapan : 20.28 Entitas harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan termasuk metode yang diterapkan. Jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode timbul dari penjualan barang.</p>	<p>Tidak ada pengungkapan tentang kebijakan akuntansi sebagai dasar pengakuan pendapatan.</p>	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena entitas tidak mengungkapkan kebijakan akuntansi sebagai dasar pengakuan pendapatan serta tidak ada penjelasan kategori pendapatan dari penjualan barang selama periode berjalan.</p>

Sumber : Analisis Peneliti

8. Beban Operasional

Berdasarkan pemahaman KPT tentang modal, penulis melakukan analisis dengan membandingkannya berdasarkan SAK ETAP. Beban operasional diakui sebesar kas yang dikeluarkan yang besarnya berdasarkan biaya historis dan disesuaikan dengan nilai wajar. KPT tidak melakukan klasifikasi beban berdasarkan sifat dan fungsi beban.

Tabel 4.14 Beban Operasional SAK ETAP

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
<p>Pengakuan : 2.33 Beban diakui dalam laporan laba rugi. Entitas harus menyusun laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut.</p>	<p>KPT menggunakan dasar <i>cash basis</i> untuk pengakuan beban dimana beban diakui seluruhnya pada periode transaksi</p>	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena semua beban diakui menggunakan dasar <i>cash basis</i> tidak adanya pemisahan beban berdasarkan sifat dan fungsinya.</p>
<p>Pengukuran : 2.3 Dasar pengukuran biaya historis dan nilai wajar. - Biaya historis. Asset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh asset pada saat perolehan. - Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu asset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban</p>	<p>Pengukuran beban menggunakan biaya historis sebesar kas yang dikeluarkan untuk memperoleh beban dan kemungkinan mempunyai manfaat dimasa depan dapat</p>	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena beban tidak diukur dengan nilai wajar melainkan hanya berdasarkan biaya historis sejumlah kas yang dibayarkan untuk memperoleh beban yang kemungkinan mempunyai manfaat dimasa depan.</p>
<p>Penyajian : - 5.4 Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan keuangan laba rugi - 5.6 Entitas menyajikan suatu analisis beban dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas, mana yang memberi informasi yang lebih andal dan relevan.</p>	<p>Beban operasional disajikan dalam laporan laba rugi dan menggabungkan semua beban</p>	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena tidak ada klasifikasi beban berdasarkan sifat dan fungsi beban.</p>

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
<p>Pengungkapan :</p> <p>- 5.8 Entitas mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi pengungkapan informasi tambahan berdasarkan sifat beban, termasuk penyusutan dan beban amortisasi dan beban imbalan kerja.</p> <p>- 28.8 Jika terdapat transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka harus diungkapkan sifat dari hubungan tersebut dan informasi transaksi saldo untuk memahami dampak potensialnya dengan laporan keuangan.</p>	<p>- KPT tidak melakukan pengungkapan beban penyusutan dimasa lalu dan masa kini</p> <p>- Tidak ada transaksi pihak-pihak yang hubungan istimewa transaksi hanya melibatkan pengurus dan petani serta</p>	<p>Tidak sesuai dengan SAK ETAP, tidak diperhitungkan beban penyusutan, sedangkan tiap tahunnya terjadi penurunan nilai yang menjadi beban dari KPT dan tidak mengungkapkan beban berdasarkan sifat dan fungsinya.</p>

Sumber : Analisis Peneliti

9. Beban Pajak

KPT Tunas Makmur secara resmi berdiri pada 27 Juni 2012 dan terdaftar pada notaris dengan nomor notaris 575 HT 0301 Tahun 2002. Berdasarkan ketentuan seharusnya KPT mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, tetapi belum mampu menghitung pajak sehingga tidak terdapat adanya beban pajak.

Tabel 4.15 Beban Pajak SAK ETAP dan KPT

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
<p>Pengakuan :</p> <p>24.3 Entitas harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar.</p>	<p>KPT tidak mengakui adanya kewajiban atas pajak penghasilan</p>	<p>Tidak sesuai SAK ETAP karena entitas tidak mengakui beban pajak dan tidak mempunyai NPWP.</p>

SAK ETAP	KPT Tunas Makmur	Sesuai/Tidak Sesuai
Pengukuran : Diukur berdasarkan besarnya pendapatan dan beban tahun berjalan selama periode berjalan dan periode sebelumnya.	KPT tidak melakukan penghitungan beban pajak yang harus dibayar	Tidak sesuai dengan SAK ETAP. Entitas tidak menghitung besarnya beban pajak
Penyajian : 3.10 Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.	Tidak terdapat penyajian beban pajak	Tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP entitas tidak memahami adanya beban pajak
Pengungkapan : 24.4 Entitas mengungkapkan secara terpisah komponen-komponen utama beban pajak penghasilan.	Tidak terdapat pengungkapan beban pajak	Tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP entitas tidak memahami adanya beban pajak

Sumber : Analisis Peneliti

4.2.2 Argumentasi Penelitian Berdasarkan Permasalahan

a) Pemahaman Laporan Keuangan

Berdasarkan tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan di KPT Tunas Makmur, sebagian besar petani yang juga anggota KPT belum memahami tentang prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan. Kurangnya pemahaman ini dimungkinkan tidak adanya sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni tentang ilmu akuntansi.

Sesuai dengan hasil wawancara dan analisis kesesuaian dengan SAK ETAP menunjukkan bahwa KPT sudah memahami tentang bagaimana mengakui dan mengukur kas tetapi tidak dapat menyajikan dan mengungkapkan komponen kas sedangkan belum memahami untuk

komponen persediaan dan aset tetap. Seharusnya KPT harus mengakui adanya beban penyusutan dan penurunan nilai dari aset tetap di tiap periodenya. Dari sisi penyajian, tidak ada klasifikasi kewajiban yang harus diselesaikan untuk jangka pendek dan jangka panjang serta tidak terdapatnya pemisahan antara modal dan saldo laba dan tidak terdapat pengungkapan mengenai laba ditahan, kebijakan akuntansi untuk mengakui persediaan dan rekonsiliasi aset tetap.

Pemahaman petani tentang pentingnya laporan keuangan masih sangat kurang sehingga KPT belum maksimal dalam penyusunan laporan keuangan. Kemungkinan yang menjadi kendala adalah karena tidak ada sosialisasi berkala dan tidak ada program pelatihan tentang praktik akuntansi. Harus ada pihak-pihak yang lebih peduli untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya akuntansi kepada usaha kecil di tiap daerah.

b) Kesesuaian dengan SAK ETAP

Tingkat kesesuaian laporan keuangan petani bawang merah di KPT Tunas Makmur dapat dilihat pada kaitan akun-akun terhadap SAK ETAP yang menjelaskan KPT tidak dapat menerapkan SAK ETAP dengan baik dan tingkat kesesuaiannya masih sangat rendah. Secara keseluruhan KPT hanya memahami tentang aspek pengakuan dan pengukuran pada beberapa komponen seperti kas, kewajiban, modal dan saldo laba.

KPT tidak memahami tentang aspek penyajian dan pengungkapan yang menyebabkan entitas tidak dapat menyajikan dan menjelaskan komponen

yang diperlukan pada laporan keuangan seperti penyajian dan pengungkapan kas, persediaan, aset tetap, dan pada komponen lainnya yang diteliti.

Hasil wawancara dan analisis penerapan di tiap pos pada laporan keuangan yang dilakukan menunjukkan bahwa belum menerapkan standar akuntansi yang berlaku untuk umum, tidak ada informasi yang mewajibkan laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar dimungkinkan membuat KPT belum menerapkan standar akuntansi yang berlaku. Tingkat kesesuaian pada laporan keuangan dapat terwujud apabila entitas mengikuti standar akuntansi yang berlaku umum.

Tabel 4.16 Ringkasan Kesesuaian pos-pos

Laporan Keuangan KPT dengan SAK ETAP

No.	Nama Akun	Pengakuan	Pengukuran	Penyajian	Pengungkapan
1	Kas	Sudah sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai
2	Persediaan	Sudah sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai
3	Asset Tetap	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai
4	Kewajiban	Sudah sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai
5	Modal	Sudah sesuai	Sudah sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai
6	Saldo Laba	Sudah sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai
7	Pendapatan Operasional	Sudah sesuai	Sudah sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai
8	Beban Operasional	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai
9	Beban Pajak	Tidak terdapat beban pajak	Tidak terdapat beban pajak	Tidak terdapat beban pajak	Tidak terdapat beban pajak
Jumlah yang sesuai		6/9	2/9	0/9	0/9

Sumber : Analisis Peneliti

Berdasarkan gambar diatas, dapat terlihat bahwa pada penelitian ini hanya 8 item yang memenuhi dari total 36 item menunjukkan masih minim sekali pos-pos yang sudah sesuai dengan SAK ETAP, penelitian Kristanto (2011) dan Susanto (2011) laporan keuangan yang disajikan masih sangat jauh dengan SAK ETAP. Pada penelitian Kaparang (2012) hanya beberapa pos saja yang belum sesuai dengan SAK ETAP dan penelitian Anne (2011) yang menjumpai bahwa hanya sebgaaian kecil penyajian laporan keuangan yang sudah sesuai ketentuan SAK ETAP dan hanya UMKM yang mendapat bantuan dana dari bank saja yang tingkat kesesuaian laporan keuangannya mendekati ketentuan SAK ETAP.

4.2.3 Perbedaan dengan Hasil Penelitian Sebelumnya

KPT selaku koperasi pertanian yang ada di desa membuat laporan keuangan untuk memberikan informasi mengenai penggunaan dana dan modal yang ada di KPT. Laporan keuangan yang dibuat rutin setiap bulan adalah laporan kas keluar dan kas masuk seperti pada penelitian Anna (2011).

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman KPT masih sangat rendah mengenai aspek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan dan KPT tidak menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Kristanto (2011) dan Susanto (2011) bahwa entitas tidak dapat menyajikan dan menerapkan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP. Kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan akuntansi menjadi kendala utama untuk menerapkan standar akuntansi yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan penelitian Putra (2012) dan Kristanto (2011). Selain itu pelaku usaha tidak mengenal adanya SAK ETAP menjadi kendala seperti pada penelitian Auliyah (2012).

Perbedaan dengan hasil penelitian yang telah disebutkan sebelumnya adalah peneliti menelusuri lebih dalam tentang pemahaman objek penelitian tentang laporan keuangan dilihat dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Hasil penelitian yang kedua adalah tingkat kesesuaian dengan SAK ETAP yang masih sangat rendah, berbeda dengan penelitian Kaparang (2012) hanya terdapat beberapa akun yang belum sesuai dengan SAK ETAP pada praktik akuntansi di BPR.

Berbeda dengan hasil penelitian Anna (2011) yaitu UMKM yang mendapatkan bantuan dana dari bank atau lembaga keuangan lainnya mampu membuat laporan keuangan yang lengkap, sedangkan pada penelitian ini laporan keuangan yang disusun oleh KPT dapat dikatakan masih sederhana, hanya dengan memasukkan pos-pos yang ada dan tidak melakukan klasifikasi. Sama seperti pelaku usaha kecil dan menengah yang lainnya, yang menjadi prioritas dalam menyusun laporan keuangan adalah laporan hasil penjualan karena laporan keuangan yang lainnya masih dianggap sulit dan rumit dalam penyusunannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang dikemukakan, berikut kesimpulan dari penelitian ini :

1. Kelompok Pemuda Tani (KPT) Tunas Makmur belum memahami tentang prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan. Kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan tentang akuntansi menyebabkan KPT belum mampu untuk menyusun laporan keuangan dengan baik.
2. Tingkat kesesuaian dalam menyusun laporan keuangan KPT Tunas Makmur dengan SAK ETAP masih sangat rendah, yang dimungkinkan beberapa kendala seperti tidak ada sosialisasi dan pelatihan mengenai SAK ETAP yang menyebabkan petani tidak mengetahui informasi dan aturan untuk menerapkan SAK ETAP. Dibandingkan dengan aturan di SAK ETAP, beberapa prinsip akuntansi yang tidak sesuai diantaranya yaitu tidak ada pengakuan beban penyusutan serta penurunan nilai aset tetap, KPT tidak menyajikan klasifikasi kewajiban yang harus diselesaikan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dalam hal pengungkapan, tidak ada tambahan informasi mengenai kebijakan akuntansi untuk mengukur persediaan, total persediaan yang tercatat dan jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode. Selain itu, KPT tidak

membuat catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan informasi mengenai hutang usaha, modal, rekonsiliasi kas dan pengungkapan kebijakan akuntansi yang dipakai sebagai dasar pengakuan pendapatan, beban serta dasar pengakuan aset tetap.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dalam penelitian ini, saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

5.2.1 Untuk KPT Tunas Makmur

- a. KPT memperhatikan pentingnya peran laporan keuangan yang baik dan benar sehingga dapat memudahkan dalam melakukan pengawasan serta pengambilan keputusan.
- b. Tingkat kesesuaian akun-akun laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku masih sangat rendah, diharapkan KPT untuk meningkatkan pemahaman tentang standar akuntansi sehingga suatu saat nanti dapat menerapkan standar akuntansi yang berlaku. Misalnya pengakuan dan pengukuran aset tetap yang harus mengakui beban penyusutan dan penurunan nilai aset tetap. Selain itu KPT harus meningkatkan pemahaman tentang pajak, karena KPT sebagai koperasi berbadan hukum mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.

5.2.2 Untuk Pemerintah Daerah

- a. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak akademis untuk membantu mensosialisasikan peran penting akuntansi dan laporan keuangan dalam kegiatan usaha.
- b. Melalui program pelatihan tentang SAK ETAP diharapkan Pemerintah Daerah dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berperan aktif untuk membantu mewujudkannya penerapan SAK ETAP di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah sesuai dengan tujuan dibentuknya SAK ETAP.
- c. BPS Kabupaten Brebes lebih aktif untuk mendapatkan data informasi dan laporan keuangan di bidang pertanian yang sangat dibutuhkan Pemerintah dalam menentukan pemberian subsidi dan program pertanian di Indonesia.

5.2.3 Untuk Peneliti Selanjutnya

- a. Melakukan penelitian pada UMKM yang sudah menerapkan SAK ETAP.
- b. Melakukan tinjauan penelitian tentang faktor yang menjadi kendala dan mempengaruhi penerapan SAK ETAP dan dampak dari sebelum dan sesudah UMKM menerapkan SAK ETAP.
- c. Menyajikan laporan keuangan yang sudah sesuai dengan SAK ETAP

DAFTAR PUSTAKA

- Anna Yane, Devi. 2011. **Analisis Penerapan Akuntansi dan Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil dan Menengah-Sentra Industri Kaos di Jawa Barat**. Seminar Nasional “Perkuatan UMKM sebagai *Leading Sector* Perekonomian Indonesia”. 1 Oktober 2011. Malang. FEB-UMM.
- Auliyah, Iim Ma’rifatul. 2012. **Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Pada UMKM Kampung Batik di Sidoarjo**. Artikel Ilmiah Program Sarjana. STIE Perbanas
- Edwin et all. 2012. **IFRS for SMEs untuk Usaha Kecil Menengah atau Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik**. Badan Penerbit Indeks. Jakarta
- Ervillia, Puspa. 2009. **Analisis Perumusan dan Penerapan Sistem Akuntansi pada Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus UKM Waroeng Cokelat Bogor)**. Skripsi program Sarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Harahap, Sofyan S. 2011. **Teori Akuntansi (Edisi Revisi 2011)**. Badan Penerbit Rajawali Press. Jakarta.
- Hariwijaya M. dan Triton P.B. 2011. **Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis**. Badan Penerbit Oryza. Yogyakarta.
- Hariyadi, Rinto. **54 Koperasi Pertanian Tidak Aktif dari Total 58 Koperasi**. Jum’at, 22 Maret 2013. <http://suaramerdeka.com>
- Himatansi. 2010. **SAK UMUM vs SAK ETAP**. Jum’at, 28 Mei 2010. <http://www.himatansi.org>.
- Hoesada, Jan. 2011. **SAK ETAP dan Implementasi pada Industri Perbankan**. Kuliah Umum Akuntansi. 23 Desember 2011. STIE Indonesia Banking School
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik**. Ikatan Akuntan Indonesia. Mei 2009. Jakarta.
- , Yakub. 2011. **Implementasi SAK ETAP**. Ikatan Akuntan Indonesia. Desember 2011. Jakarta
- . 2012. **Standar Akuntansi Keuangan**. Ikatan Akuntan Indonesia. Januari 2012. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, Hoesada, Jan. 2010. **Implementasi SAK ETAP : Sumber Daya Peluang dan Tantangan**. Kongres XI “Instropeksi dan Transformasi Profesi Akuntan Menuju IAI 2020: Peran Akuntan dalam Meningkatkan Nilai Tambah Bagi Perekonomian Nasional”. 9 Desember 2010. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia.

- Kaparang, Vica Wilani Putri. 2012. **Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Praktik Akuntansi Perbankan BPR (Studi pada PT Bank Perkreditan Rakyat Dana Raya)**. Skripsi Program Sarjana. STIE Indonesia Banking School.
- Koran Republika. 2013. **Bank Harus Berani Memberikan Kredit Untuk Sektor Pertanian**. Senin, 22 April 2013. Koran Republika
- Kristanto, Eri. 2011. **Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada UMKM Pengrajin Rotan Di Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo**. Skripsi Program Sarjana. Universitas Sebelas Maret.
- Martani, Dwi. 2011. **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)**. Seminar Nasional Riau “Implementasi IFRS”. 15 Maret 2011. Departemen Akuntansi FE UI.
- . 2011. **Standar akuntansi : mewujudkan laporan yang berkualitas**. *Journal Mini Economica* FE UI. Volume 38. 52-59.
- Nurhayat, Wiji. 2013. **HKTI Sebut Pertanian Era Orde Baru Maju Karena Data Statistik Kuat**. Jum’at, 26 April 2013. <http://finance.detik.com>.
- . 2013. **Kepala BPS Rekrut 246 ribu Petugas Survei Sensus Pertanian 2013**. Jum’at, 26 April 2013. <http://finance.detik.com>.
- . 2013. **Tragis Belajar Dari RI Tapi Pertanian Thailand dan Vietnam Lebih Maju**. Rabu, 27 Maret 2013. <http://finance.detik.com>.
- Nurmatasari, Avitia. 2013. **Hari Ini Dimulai Sensus Pertanian 2013**. Rabu, 1 Mei 2013. <http://finance.detik.com>.
- PPL IAI. 2009. **Konvensi Nasional Akuntansi VI IAI Dibuka oleh Gubernur Jawa Barat**. Selasa, 18 Agustus 2009. <http://www.iaiglobal.or.id>.
- Putra, Hermon Adhy dan Kurniawati, Elisabeth. 2012. **Penyusunan Laporan Keuangan Untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berbasis SAK ETAP**. Pekan Ilmiah Dosen FEB. 14 Desember 2012. Salatiga. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Ramona, Fitria. 2009. **Overload Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan Analisis Teknik Serta Prosedur Akuntansi Untuk Pengembangan Penerapan Akuntansi Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia**. Skripsi Program Sarjana. Universitas Andalas
- Rizky, R. dan Siregar, S. 2011. **Kualitas Laporan Keuangan UMKM serta Prospek Implementasi SAK ETAP**. Simposium Nasional Akuntansi XIV. Aceh: 21-22 Juli.

- Rosyadi, Imron, Achmad Nur dan Triyono. 2010. **Meningkatkan Efisiensi dan Profitabilitas pada Usaha Tani Bawang Merah di Kabupaten Brebes.** *Warta Jurnal.* Volume 13. Nomor 1. 65-76
- Schroeder, Richard G et all. 2011. *Financial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases. 10th Edition.* Wiley
- Sekaran, Uma. 2011. **Metode Penelitian untuk Bisnis Edisi 4 Buku 1.** Badan Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sekaran, Uma and Bougie Roger. 2010. *Research Methods for Busines ; A Skill Building Approach. 5th edition.* Arthabook, Wiley
- Suhairi dan Wahdini. 2006. **Persepsi Akuntan terhadap Overload Standar Akuntansi Keuangan (SAK) bagi Usaha Kecil dan Menengah.** Simposium Nasional IX Padang: 23-25 Agustus.
- Susanto, Edi. 2011. **Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di UMKM Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta (Studi Kasus).** Skripsi Program Sarjana. Universitas Sebelas Maret.
- Tambunan, Tulus. 2009. **UMKM Di Indonesia.** Edisi I. Badan Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.** <http://www.depkop.go.id/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.** <http://www.depkop.go.id/>
- Widodo, Tri. 2006. **Peran Sektor Informal Terhadap Perekonomian Daerah.** *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Volume 21 Nomor 3. 254-267

LAMPIRAN



LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

I. Daftar pertanyaan profil Kelompok Tani

1. Apakah nama UKM/organisasi kelompok tani yang bapak dan teman-teman dirikan?
2. Siapa yang menjadi pencetus atau pendirinya?
3. Tahun berapa kelompok tani ini dibentuk?
4. Dimana kelompok tani ini didirikan?
5. Siapa saja yang meresmikan berdirinya kelompok tani?
6. Apakah maksud dan tujuan didirikannya kelompok tani?
7. Apakah manfaatnya jika bergabung di kelompok tani?
8. Apakah terdapat struktur organisasinya?
9. Ada berapa anggota yang dimiliki kelompok tani saat ini?
10. Apakah ada anggota selain petani bawang merah?
11. Bagaimana caranya untuk bergabung di kelompok tani?
12. Apa yang diharapkan dan dicita-citakan dengan terbentuknya KPT Tunas Makmur?

II. Identifikasi Pemahaman KPT tentang Laporan Keuangan

1. Apakah petani di KPT Tunas Makmur melakukan pembukuan/pencatatan atas transaksi?
2. Transaksi apa saja yang biasanya dilakukan pembukuan/pencatatan?
3. Apakah dari pembukuan tersebut petani dapat membuat laporan keuangan?
4. Apakah yang petani ketahui tentang laporan keuangan?
5. Apakah menurut petani laporan keuangan itu penting?
6. Laporan keuangan apa yang dibuat oleh petani?
7. Apakah KPT membuat laporan keuangan secara rutin?
8. Apakah laporan keuangan yang dibuat memberikan manfaat untuk perkembangan usaha KPT?
9. Apakah KPT mempunyai satu acuan dalam pembuatan laporan keuangan?

Lanjutan Lampiran 1

10. Siapa saja pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan KPT?

III. Identifikasi kondisi keuangan petani yang tergabung di KPT

A. Kas dan setara kas

1. Kapan terdapat pengakuan kas dan setara kas?
2. Bagaimana prinsip pengukuran terhadap kas dan setara kas?
3. Apakah KPT memahami tentang prinsip pengukuran biaya historis dan nilai wajar tentang kas dan setara kas?
4. Bagaimana penyajian tentang pos kas dan setara kas?
5. Bagaimana pengungkapan pada pos kas dan setara kas?

B. Persediaan

1. Apa saja persediaan yang terdapat di KPT?
2. Bagaimana pengakuan terhadap persediaan di KPT?
3. Bagaimana pengukuran persediaan yang ada di KPT?
4. Bagaimana penyajian tentang pos persediaan?
5. Bagaimana pengungkapan pada pos persediaan?

C. Aset Tetap

1. Apakah petani mempunyai aktiva tetap seperti tanah, kendaraan atau yang lainnya?
2. Bagaimana pengakuan terhadap aset tetap di KPT?
3. Apakah terdapat pengakuan beban penyusutan dan penurunan nilai aset di KPT?
4. Apakah terdapat pengakuan biaya pemeliharaan aset?
5. Bagaimana penyajian tentang pos aset tetap?
6. Bagaimana pengungkapan pada pos aset tetap?

D. Kewajiban

1. Kapan terdapat pengakuan hutang oleh KPT?
2. Apakah terdapat hutang jangka panjang dan jangka pendek?
3. Apakah KPT memahami tentang prinsip pengukuran biaya historis dan nilai wajar tentang kewajiban?

Lanjutan Lampiran 1

4. Apakah kewajiban dilunasi pada saat produksi atau setelah masa penjualan?
5. Bagaimana penyajian tentang pos kewajiban?
6. Bagaimana pengungkapan pada pos kewajiban?

E. Modal

1. Berasal darimana saja modal KPT?
2. Bagaimana prinsip pengakuan modal oleh KPT?
3. Apakah terdapat modal tambahan pada tahun berjalannya kegiatan produksi?
4. Apakah dasar pengukuran modal di KPT?
5. Bagaimana penyajian tentang pos modal pada laporan keuangan?
6. Bagaimana pengungkapan pada pos modal?

F. Pendapatan

1. Bersumber darimana saja pendapatan yang masuk?
2. Bagaimana prinsip pengakuan pendapatan oleh KPT?
3. Metode penjualan apakah yang digunakan KPT?
4. Apakah setiap metode penjualan mempengaruhi besarnya pendapatan KPT?
5. Bagaimana prinsip pengukuran pendapatan?
6. Bagaimana penyajian tentang pos pendapatan?
7. Bagaimana pengungkapan pada pos pendapatan?

G. Beban Operasional

1. Bagaimana penetapan harga pokok penjualan di KPT?
2. Kapan petani terdapat pengakuan beban operasional?
3. Beban apa saja yang ditanggung KPT?
4. Apakah KPT memahami tentang prinsip pengukuran biaya historis dan nilai wajar tentang beban?
5. Apakah terdapat beban lain diluar kegiatan operasional?
6. Bagaimana penyajian tentang pos beban operasional?
7. Bagaimana pengungkapan pada pos beban operasional?

H. Beban Pajak

1. Apakah KPT memahami tentang beban pajak?
2. Apakah selama ini KPT telah mengakui adanya beban pajak?
3. Bagaimana pengukuran tentang beban pajak?
4. Apakah terdapat penyajian dan pengungkapan beban pajak oleh KPT?

IV. Identifikasi Aktivitas Pendukung

1. Apakah terdapat aktivitas diluar pertanian?
2. Apakah PPL selaku Pembina banyak memberikan masukan?
3. Apakah terdapat program penyuluhan dari pemerintah daerah?
4. Apa saja yang dibahas pada saat penyuluhan?
5. Siapa saja yang menjadi pelanggan yang membeli hasil panen petani?
6. Siapa saja yang menjadi pemasok bahan baku utama?



CURICULUM VITAE



APTA WIDODO HARTAMA

**Perumahan Bumi Mas Raya Blok D2 No.10
Cikokol, Tangerang 15117**

**Mobile : +62 812 9709 4834
+62 857 1422 7216**

PERSONAL DATA

Name	Apta Widodo Hartama
Nick Name	Apta / Wido
Sex	Male
Place, Date of Birth	Brebes, 17 February 1991
Nationality	Indonesia
Marital Status	Single
Height, Weight	175 cm, 70 kg
Religion	Islam
Address	Perumahan Bumi Mas Raya Blok D2 No.10 Cikokol, Tangerang 15117
Hobby	Badminton, Football and Reading
Mobile	+62 812 9709 4834, +62 857 1422 7216
E-mail	aptahart@gmail.com aptahart.wido@yahoo.co.id
GPA	3,29

EDUCATIONAL BACKGROUND

2009 - 2013	STIE Indonesia Banking School Jakarta, <i>Accounting</i>
2006 - 2009	Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Sandhy Putra Purwokerto, Jawa Tengah, Teknik Telekomunikasi
2003 - 2006	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bumiayu, Brebes
1999 - 2002	Madrasah Diniyah Muhammadiyah Laren Bumiayu, Brebes
1998 - 2003	Sekolah Dasar Negeri IV Laren Bumiayu, Brebes

ACHIEVEMENT

2013	Juara 1 Bulutangkis Olimpiade IBS
2012	Juara II Bulutangkis Olimpiade IBS

2012	Juara I Futsal Olimpiade IBS
2011	Semifinalis Lomba Debat Terbuka Mahasiswa IBS “ <i>Innovative Debate Challenge</i> ”
2011	Juara II Bulutangkis Olimpiade IBS
2010	Juara I Bulutangkis Olimpiade IBS
2010	Juara I Futsal Olimpiade IBS
2009	Babak 16 besar Futsal Permata Hijau Cup, Jawa Tengah
2008	Juara II Badminton Cup SMK Telkom Purwokerto

PROFESSIONAL EXPERIENCES

Sept 2013 – Now	<i>Personal Assistant / Secretary</i> Ketua Pimpinan Senat / <i>Secretary</i> Ketua IBS	Dr. Subarjo Joyosumarto
June 2012 – August 2013	Staf Pengajar / Tutor di Smart and Fun After School	Ligy Kuswandari Sari
July-August 2011	Magang di PT. Pos Indonesia Cabang Bumiayu, Brebes	Sutarman
June 2011	<i>Internship</i> di Kantor Bank Indonesia Surabaya	Mohamad Ishak
July-August 2010	Magang di Koperasi Unit Desa Bumiayu, Brebes	H. Darsono
June 2010	Magang di Bank Rakyat Indonesia Unit Genuk, Cabang Pattimura, Semarang, Jawa tengah	Syafriyan Wahab
Sept-Nov 2008	Praktek Kerja Lapangan di PT.Telkom Cabang Banjarnegara, Jawa Tengah	Drs. Bambang .P

COURSES, WORKSHOPS, AND TRAININGS ATTENDED

2013	Analisa Kredit Training, PT. e-DEPRO Management Consultant
2013	Trade Finance Training, PT. e-DEPRO Management Consultant
2013	Zahir Accounting, PT. Zahir Internasional
2012	Dialog Terbuka Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2012	Trading Saham dan Reksadana, Bursa Efek Indonesia
2012	<i>Basic Treasury</i> , Megawastu Solusindo
2012	<i>Workshop Islamic Economic</i>
2011	<i>Workshop Insurance Industry</i> , Prudential Life Assurance
2011	<i>Indonesian Youth Conference</i>
2011	Customer Service Training, PT. e-DEPRO Management Consultant
2011	Basic Activist Training Program (BATPRO), Indonesia Banking School
2011	English for Banking, The British Institute (TBI)
2011	Accounting Goes to IBS
2010	Seminar Nasional Tindak Pidana Perbankan dan Tantangan Corporate Governance di BPR/BPRS
2010	Workshop Investasi Pasar Modal
2010	Service Excelent, PT. e-DEPRO Management Consultant

ORGANIZATION EXPERIENCES

2011	Ketua Panitia Hari Sumpah Pemuda, Indonesia Banking School bersama Kementrian Pemuda dan Olahraga
2011	Divisi Pendataan Best Student Indonesia Banking School
2011	Kepala Divisi Publikasi Lomba Internal Akuntansi Indonesia Banking School
2011	Divisi Acara Olimpiade Indonesia Banking School
2011	Divisi Acara dan Perlengkapan <i>Workshop Islamic Economic</i> , Indonesia Banking School
2010 – 2011	Ketua UKM Bulutangkis Indonesia Banking School
2010	Divisi Perlengkapan IBS Open
2010	Divisi Acara IBS Cup IV
2008	Kepala Divisi Perlengkapan Tabligh Akbar bersama Ustad Arifin Ilham, BEM Unsoed Purwokerto dan Rohis SMK Telkom Purwokerto
2008	Ketua Panitia Lomba Badminton Cup SMK Telkom Purwokerto
2007 – 2010	Ketua Persatuan Pelajar Telkom Bumiayu-Purwokerto
2007 – 2008	Divisi Olahraga dan Kesenian OSIS SMK Telkom Purwokerto
2007 – 2008	Wakil Ketua Panitia Amaliyah Idul Adha, SMK Telkom Purwokerto
2006 – 2007	Kepla Divis Ibadah dan Infaq Rohis SMK Telkom Purwokerto
2006 – 2007	Divisi Produksi Koperasi Siswa SMK Telkom Purwokerto

